# BAB 5
# HASIL YANG DICAPAI

## A. Gambaran Umum Daerah Penelitian

### 1. Kabupaten Indragiri Hilir

#### a. Sejarah Singkat Indragiri Hilir

Untuk melihat latar belakang sejarah berdirinya Kabupaten Indragiri Hilir sebagai salah satu daerah otonom, dapat ditinjau dalam dua periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan dan periode sesudah kemerdekaan Republik Indonesia.

Pada Periode Sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia, Indragiri Hilir berasal dari Kerajaan Keritang, Kerajaan Kemuning, Kerajaan Kerajaan Batin Enam Suku dan Kerajaan Indragiri**.** Kerajaan Indragiri diperkirakan berdiri tahun 1298 dengan raja pertama bergelar Raja Merlang I berkedudukan di Malaka. Pada tahun 1815, dibawah Sultan Ibrahim, ibu kota kerajaan dipindahkan ke Rengat. Dalam masa pemerintahan Sultan Ibrahim ini, Belanda mulai campur tangan terhadap kerajaan dengan mengangkat Sultan Muda yang berkedudukan di Peranap dengan batas wilayah ke Hilir sampai dengan batas Japura. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Sultan Isa, berdatanganlah orang - orang dari suku Banjar dan suku Bugis sebagai akibat kurang amannya daerah asal mereka. Khusus untuk suku Banjar, perpindahannya akibat dihapuskannya Kerajaan Banjar oleh Gubernement pada tahun 1859 sehingga terjadi peperangan sampai tahun 1963.

Dengan adanya tractaat Van Vrindchaap (perjanjian perdamaian dan persahabatan) tanggal 27 September 1938 antara Kerajaan Indragiri dengan Belanda, maka Kesultanan Indragiri menjadi Zelfbestuur. berdasarkan ketentuan tersebut, di wilayah Indragiri Hilir ditempatkan seorang Controlleur yang membawahi 6 daerah keamiran: Amir Tembilahan di Tembilahan, Amir Batang Tuaka di Sungai Luar, Amir Tempuling di Sungai Salak, Amir Mandah dan Gaung di Khairiah



Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

Mandah, Amir Enok di Enok, dan Amir Reteh di Kotabaru. Controlleur memegang wewenang semua jawatan, bahkan juga menjadi hakim di pengadilan wilayah ini sehingga Zelfbestuur Kerajaan Indragiri terus dipersempit sampai dengan masuknya Jepang tahun 1942.

Balatentara Jepang memasuki Indragiri Hilir pada tanggal 31 Maret 1942 melalui Singapura terus ke Rengat. Tanggal 2 April 1942 Jepang menerima penyerahan tanpa syarat dari pihak Belanda yang waktu itu dibawah Controlleur K. Ehling. Sebelum tentara Jepang mendarat untuk pertama kalinya di daerah ini dikumandangkan lagu Indonesia Raya yang dipelopori oleh Ibnu Abbas.

Pada masa pendudukan Jepang ini Indragiri Hilir dikepalai oleh seorang Cun Cho yang berkedudukan di Tembilahan dengan membawahi 5 Ku Cho, yaitu : Ku Cho Tembilahan dan Tempuling di Tembilahan, Ku Cho Sungai Luar, Ku Cho Enok, Ku Cho Reteh, dan Ku Cho Mandah. Pemerintahan Jepang di Indragiri Hilir sampai bulan Oktober 1945 selama lebih kurang 3,5 tahun.

Pada Periode Setelah Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, di awal Kemerdekaan RI, Indragiri (Hulu dan Hilir) masih merupakan satu kabupaten. Kabupaten Indragiri ini terdiri atas 3 kewedanaan, yaitu Kewedanaan Kuantan Singingi dengan ibukotanya Taluk Kuantan, Kewedanaan Indragiri Hulu dengan ibukotanya Rengat dan Kewedanaan Indragiri Hilir dengan ibukotanya Tembilahan. Kewedanaan Indragiri Hilir membawahi 6 wilayah yaitu : Tempuling/ Tembilahan, Enok, Gaung Anak Serka, Mandah/Kateman, Kuala Indragiri, dan Reteh. Perkembangan tata pemerintahan selanjutnya, menjadikan Indragiri Hilir dipecah menjadi dua kewedanaan masing-masing : Kewedanaan Indragiri Hilir Utara meliputi Kecamatan Tempuling, Kecamatan Tembilahan, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kecamatan Mandah, Kecamatan Kateman, dan Kecamatan Kuala Indragiri dengan ibukotanya Tembilahan serta Kewedanaan Indragiri

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

Hilir Selatan meliputi Kecamatan Enok dan Kecamatan Reteh dengan ibukotanya Enok.

Setelah merasa persyaratan administrasinya terpenuhi maka masyarakat Indragiri Hilir memohon kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Riau, agar Indragiri Hilir dimekarkan menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II yang berdiri sendiri (otonom). Setelah melalui penelitian, baik oleh Gubernur maupun Departemen Dalam Negeri, maka pemekaran diawali dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau (Propinsi Riau) tanggal 27 April 1965 nomor 052/5/1965 sebagai Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir.

Pada tanggal 14 Juni 1965 dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 49, maka Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir resmi dimekarkan menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (sekarang Kabupaten Indragiri Hilir) yang berdiri sendiri, yang pelaksanaannya terhitung tanggal 20 November 1965.

**b. Kondisi Umum**

Kabupaten Indragiri Hilir resmi menjadi Daerah Tingkat II berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 1965 tanggal 14 Juni 1965 ( LN RI No. 49 ). Kabupaten Indragiri Hilir terletak di pantai Timur pulau Sumatera, tepatnya di 0.36' LU - 1.07' LS, dan 104.10' - 102.30' BT, merupakan gerbang selatan Propinsi Riau, dengan luas daratan 11.605,97 km² dan perairan 7.207 Km² berpenduduk kurang lebih 683.354 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis, Indragiri Hilir yang sebelumnya dijuluki “Negeri Seribu Parit” yang sekarang terkenal dengan julukan ”NEGERI SERIBU JEMBATAN” dikelilingi perairan berupa sungai-sungai besar dan kecil, parit, rawa-rawa dan laut, secara fisiografis Kabupaten Indragiri Hilir beriklim tropis merupakan sebuah daerah dataran rendah yang terletak diketinggian 0-4 meter di atas permukaan laut dan

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

dipengaruhi oleh pasang surut. Berikut ini gambar peta dari Kabupaten Indragiri Hilir:

**Gambar 5.1 Peta Citra Indragiri Hilir**

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

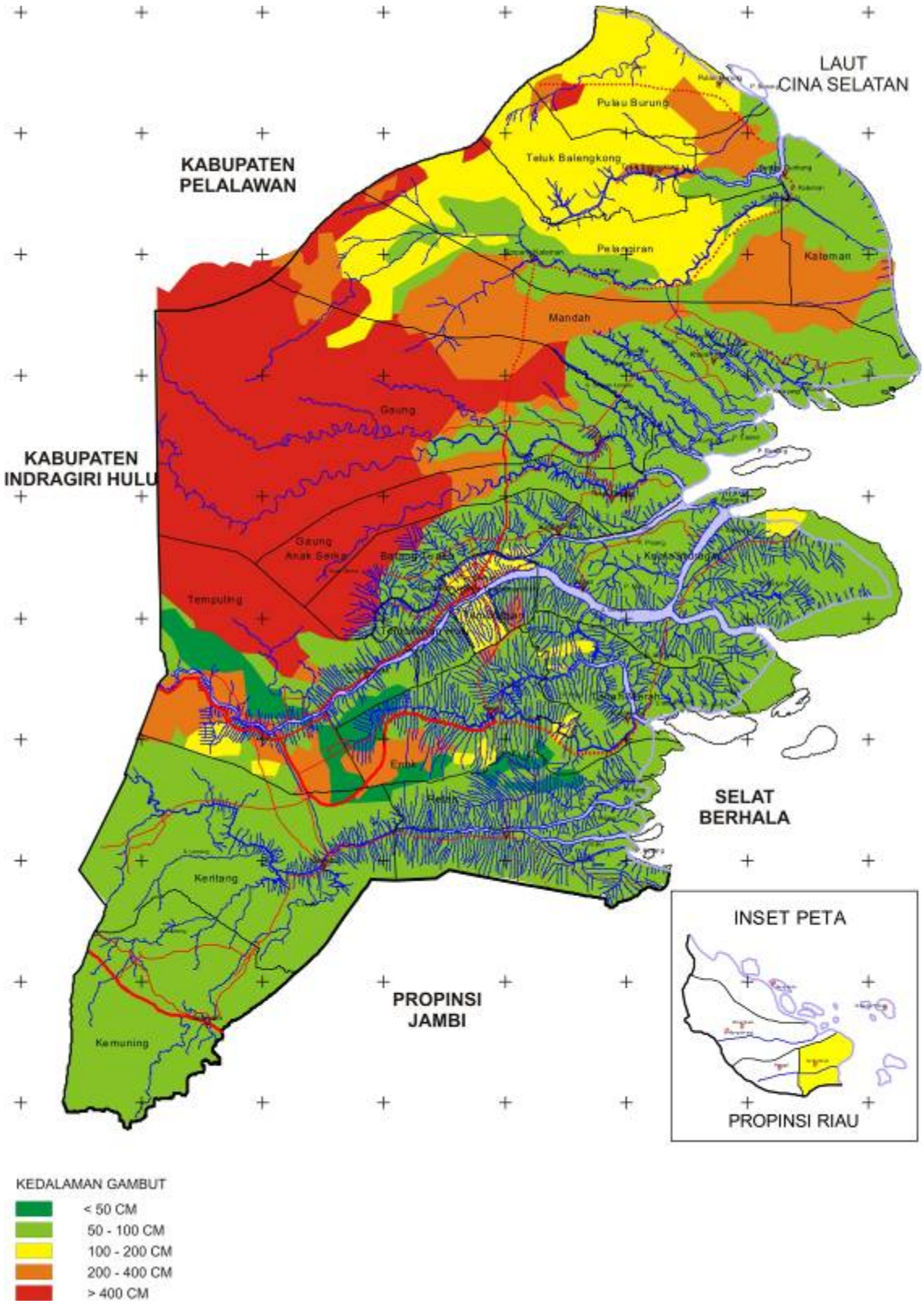


**Gambar 5.2 Peta Topografi Kabupaten Indragiri Hilir**

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

Batas-batas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Pelalawan.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kab. Tanjung Jabung Prop. Jambi.
- Sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Indragiri Hulu.
- Sebelah Timur berbatas dengan Propinsi Kepulauan Riau.

Sebagian besar dari luas wilayah atau 93,31% daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah dataran rendah, yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa dengan tanah gambut (peat), daerah hutan payau (mangrove) dan terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil dengan luas lebih kurang 1.082.953,06 hektar dengan rata-rata ketinggian lebih kurang 0-3 Meter dari permukaan laut.

Sedangkan sebagian kecilnya 6,69% berupa daerah berbukit-bukit dengan ketinggian rata-rata 6-35 meter dari permukaan laut yang terdapat dibagian selatan Sungai Reteh Kecamatan Keritang, yang berbatasan dengan Propinsi Jambi .

Dengan ketinggian tersebut, maka pada umumnya daerah ini dipengaruhi oleh pasang surut, apalagi bila diperhatikan fisiografinya dimana tanah-tanah tersebut terbelah-belah oleh beberapa sungai, terusan, sehingga membentuk gugusan pulau-pulau.

Sungai yang terbesar di daerah ini adalah Sungai Indragiri Hilir yang berhulu di penggunungan Bukit Barisan (Danau Singkarak), sungai Indragiri mempunyai tiga muara ke Selat Berhala, yaitu di Desa sungai Belu, Desa Perigi Raja dan Kuala Enok.

Sedangkan sungai-sungai lainnya adalah : Sungai Guntung, Sungai kateman, Sungai Danai, Sungai Gaung, Sungai Anak Serka, Sungai Batang Tuaka, Sungai Enok, Sungai Batang, Sungai Gangsal, yang hulunya bercabang tiga yaitu Sungai Gangsal, Sungai Keritang, Sungai Reteh, Sungai Terap, Sungai Mandah, Sungai Igal, Sungai Pelanduk, Sungai Bantaian, dan sungai Batang Tumu.

Pulau-pulau yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir pada umumnya telah di diami penduduk dan sebagian diusahakan penduduk

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

untuk dijadikan kebun-kebun kelapa, persawahan pasang surut, kebun sagu dan lain sebagainya.

Gugusan pulau tersebut meliputi : Pulau Kateman, Pulau Burung, Pulau Pisang, Pulau Bakong, Pulau Air Tawar, Pulau Pucung, Pulau Ruku, Pulau Mas, Pulau Nyiur dan pulau-pulau kecil lainnya. Disamping gugusan pulau tersebut maka terdapat pula selat-selat/terusan kecil seperti : Selat/Terusan Kempas, Selat/Terusan Batang. Selat/Terusan Concong. Selat/Terusan Perawang, Selat/Terusan Patah Parang, Selat/Terusan Sungai Kerang, dan Selat/Terusan Tekulai. Selain selat/terusan alam terdapat pula terusan buatan antara lain : Terusan Beringin, Terusan Igal, dan lain-lain Selain itu di daerah ini juga terdapat danau dan tanjung yakni Danau Gaung, Danau Danai dan Danau Kateman, sedangkan tanjung yang ada di Indragiri Hilir adalah Tanjung Datuk dan Tanjung Bakung.

Pada umumnya struktur tanah di Kabupaten Indragiri Hilir terdiri atas tanah Organosol (Histosil), yaitu tanah gambut yang banyak mengandung bahan organik. Tanah ini dominan di Wilayah Indragiri Hilir terutama daratan rendah diantara aliran sungai. Sedangkan disepanjang aliran sungai umumnya terdapat formasi tanggul alam natural river leves yang terdiri dari tanah-tanah Alluvial (Entisol) dan Gleihumus (Inceptisol).

Vegetasi alami dari daerah tanah-tanah organosol, alluvial dan gleihumus adalah hutan pematang, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder, hutan pasang surat, penggunaan lahan untuk hutan lebat, belukar dan sejenisnya pada tahun 1994 seluas 841.242 hektar.

Luas areal perkebunan meningkat dari 379.760 hektar menjadi 464.802 hektar atau meningkat 8,50% dibandingkan dengan periode sebelumnya sedangkan total produksi hasil perkebunan juga mengalami peningkatan dari 283.266 ton menjadi 416.690 ton naik sebesar 133.424 ton atau 13,34%.

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

Topograpi daerah Indragiri Hilir terdiri dari daratan dan perairan yang beriklim tropis basah, curah hujan tertinggi 1300 mm, hujan turun antara bulan oktober sampai maret setiap tahunnya. Sedangkan musim kemarau kadang-kadang hujan tidak turun selama 3 (tiga) bulan lamanya. Sehingga menimbulkan kesulitan air bersih, pengairan dan sebagainya.

Angin yang bertiup sepanjang tahun adalah angin utara dan angin selatan. Pada waktu musim angin utara terjadi musim gelombang, serta air pasang yang cukup tinggi, yang membawa air laut berkadar garam kehulu sungai, sehingga membawa pengaruh terhadap tingkat kesuburan bagi tanam-tanaman tertentu yang tidak tahan terhadap kadar air dengan tingkat keasinan tinggi.

Secara geografis wilayah Kabupaten Indragiri Hilir memiliki potensi perairan laut dan perairan umum yang cukup luas serta daratan yang dapat dikembangkan usaha budidaya perikanan, berpeluang bagi Investor untuk menanamkan investasi baik dibidang penangkapan khususnya di perairan lepas pantai dan dibidang budidaya perikanan (tambak, keramba, budidaya kerang anadara dan kolam).

Disamping sungai-sungai dan selat di Kabupaten Indragiri Hilir banyak terdapat parit-parit baik keberadaannya secara proses alami atau yang dibuat manusia dimana sebagian besar berfungsi sebagai drainase pengairan dan transportasi bagi masyarakat.

**c. Lambang Daerah Kabupaten Indragiri Hilir**

**Gambar 5.3 Lambang Daerah Kabupaten Indragiri Hilir**

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

Motif-motif yang terdapat pada Lambang Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai pengertian sebagai berikut :

1) **Sket Puri Tujuh :** Melambangkan aspek sejarah/kebudayaan daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada periode Melayu Tua seperiode dengan kerajaan Sriwijaya, maka di Indragiri Hilir ada sebuah Kerajaan Melayu yang bernama Keritang terkenal karena Puri Tujuh yang Gapura (Pintu Gerbang) sebanyak tujuh lapis. Dapat pula diartikan sebagai sampiran bahwa di daerah Kabupaten Indragiri Hilir mengalir tujuh buah sungai besar. Landasan Puri Tujuh yaitu Sket Perahu dengan Perigi memiliki nilai historis yaitu kebesaran Indragiri Hilir lama, juga mempunyai makna masa depan kejayaan di laut dan di sungai dengan semangat yang tidak kunjung padam.
2) **Warna Dasar Hijau Daun Tua :** Melambangkan kesuburan tanah Indragiri Hilir.
3) **Simpul Tali 65 Pintal :** Melambangkan persatuan rakyat dan tahun terbentuknya Kabupaten Indragiri Hilir.
4) **Padi dan Kelapa :** Melambangkan hasil utama daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Empat belas butir padi merupakan tanggal terbentuknya Kabupaten Indragiri Hilir. Enam buah bibit kelapa merupakan bulan terbentuknya Kabupaten Indragiri Hilir.
5) **Gelombang 5 Lapis :** Melambangkan bahwa Indragiri Hilir adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berfalsafah Pancasila.

**d. Visi dan Misi Kabupaten Indragiri Hilir**

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir dan amanat pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir, maka dirumuskanlah sebuah visi sebagai berikut:

**“INDRAGIRI HILIR BERJAYA DAN GEMILANG TAHUN 2025”**

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

Keberhasilan Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengembangkan wilayahnya yang memiliki kekhasan sebagai wilayah pasang surut dan bergambut, menjadi sebuah wilayah yang telah berkembang, maju, dan terbuka adalah merupakan bukti bahwa di wilayah lahan marginal telah dapat diwujudkan suatu kehidupan yang menjadikan bagi masa depan daerah dan masyarakat yang setara dengan daerah-daerah lainnya yagn sifat lahan wilayahnya jauh lebih berpotensial.

Tingkat kemajuan yang akan dicapai oleh Kabupaten Indragiri Hilir, dapat diukur dengan menggunakan ukuran-ukuran yang lazim digunakan dalam melihat tingkat kemakmuran yang tercermin dari pada tingkat pendapatan dan distribusinya dalam masyarakat. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh masyarakat dan semakin meratanya distribusinya pendapatan tersebut dalam masyarakat, maka akan semakin maju tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Demikian pula dari sisi mutu sumberdaya manusianya dengan menggunakan indikator sosia budaya yang dapat dilihat dari tingkat penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang tercermin melalui tingkat pendidikan masyarakat terendah, dan budaya masyarakat, sedangkan untuk derajat kesehatan masyarakat dilihat dari angka harapan hidup yang semakin panjang.

Disamping indikator - indikator ekonomi dan sosial budaya tersebut, juga indikator politik, hukum, keamanan dan ketertiban adalah merupakan sesuatu yang mutlak untuk dapat dijadikan indikator dalam mengukur kemajuan daerah.

Suatu kemajuan yang hebat (**GEMILANG**) akan dapat dicapai melalui pengelolaan yang lebih baik terhadap sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan yang bersinergi, sistematis dan konseptual antara kesejahteraan masyarakat, memperkuat struktur perekonomian daerah, penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan politik yang semakin berkualitas dan berkembangnya tatanan sosial dan budaya masyarakat.

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut diatas, maka akan ditempuh melalui misi sebagai berikut :

1) **Mewujudkan daya saing daerah :** adalah memperkuat perekonomian daerah yang berbasis pada potensi dan keunggulan daerah, meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan kekayan sumberdaya alam secara efisien dan efektif dengan tetap memegang prinsip-prinsip keberlanjutan (sustainable) meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu menguasai IPTEK dengan tetap memiliki nilai-nilai moral religius dan kultural, pembangunan infrastruktur yang maju dan mampu diakses secara merata.
2) **Mewujudkan suasana kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah yang demoktratis :** adalah menjadikan suasana kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintah yang dinamis sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pancasila dan konsitusi negara dalam koridor NKRI, semakin mantapnya kelembagaan politik, masyarakat fan kebudayaan, semakin dinamisnya komunikasi dan interaksi antara masyarakat dan pemerintah dalam mempaerjuangkan dan mewujudkan kepentingan publik yang lebih luas, serta semakin berkembangnya dengan mantap dan mapannya suasanan kehidupan yang menjunjung hukum dan perwujudan penegakan hukum yang adil, kinsisten, serta tindak diskriminatdi.
3) **Mewujudkan pemerataaan pembangunan dan hasil-hasilnya :** adalah agar seluruh wilayah Kabupaten Indragiri hilir dan seluruh kelompok masyarakat dapat berkembang, maju dan sejahtera secara bersama-sama tanpa ada yang tertinggal ataupun ditinggalkan, keberpihakan pembangunan kepada kelompok rentan harus menjadi prioritas, berkembangnya aksesbilitas di seluruh wilayah, dan menjangkau ke seluruh wilayah dan kelompok masyarakat, serta hilangnya diskriminasi termasuk gender.

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

4) **Mewujudkan suasana aman, dama, dan harmonis yang bermoral beretika dan berbudaya :** adalah dengan menciptakan keadaan kondusif yang pada berbagai aspek seperti asepek ekonomi, sosial budaya dan politik sebagai daerah yang pada awalnya memiliki tingkat heterogenitas namun telah melebur dalam satu nilai kurtural yang dijunjung secara bersama yakni melayu maka harmonisasi dalam kehidupan masyarakat yang telah terwujud harus dapat dipertahankan terus dan dikembangkan agar mampu menjadi filter yang handal untuk menangkal masuknya nilai-nilai asingyang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan mengakomodir nilai-nilai yang mampu membawa perubahan masyarakat pada kondisi yang lebih baik dan lebih sejahtera.

5) **Mewujudkan daerah yagn memiliki peran penting pada tingkat tegional nasional dan internasional :** adalah merupakan upaya untuk menjadikan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kenergaraan dan sistem sosial, ekonomi, dan kebudayaan pada tataran regional nasional dan internasional sehingga perlu semakin dimantapkan infentitas dan integrasi yang dapat menjadikan kebanggaan tersendiri sebagai masyarakat indragiri hilir, mendorong meningkatkan dan mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan di berbagai dengan berbagai pihak di dalam maupun di luar daerah pada skala regional, nasional dan internasional.

**e. Rencana Strategis Daerah**

1) ARAH PEMBANGUNAN KAB. INDRAGIRI HILIR

a) Mewujudkan Daya Saing Daerah

- Memperkuat perekonomian daerah
- Membangun sumberdaya manusia yang bermutu
- Membangun struktur perekonomian
- Membangun infrastruktur

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

b) Mewujudkan Suasana Kehidupan Masyarakat dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Demogratis

- Penegakan hukum
- Penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas
- Pembangunan budaya politik

c) Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Hasil-hasilnya

- Pemerataan pembangunan
- Kemandirian daerah
- Penyediaan infrastruktur pemukiman yang layak
- Kesetaraan gender

d) Mewujudkan Suasana Aman, Damai, dan Harmonis yang Bermoral, Beretika dan Berbudaya

- Penciptaan suasana kehidupan dan lingkungan yang kondusif
- Pembangunan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat
- Pengembangan nilai-nilai budaya melayu

e) Mewujudkan Kabupaten Indragiri Hilir yang Memiliki Peran Penting di Lingkungan Regional, Nasional dan Internasional

- Mengembangkan kerjasama regional, nasional, dan internasional
- Meningkatnya investasi dari luar Kabupaten Indragiri Hilir

2) PROGRAM PEMBANGUNAN STRATEGIS

- Pembangunan Bandara Tempuling
- Percepatan fungsionalisasi Pelabuhan Samudera Kuala Enok
- Pembangunan Jembatan Kuala Getek
- Pembangunan Jembatan Sei Gergaji
- Peningkatan Sumber Daya Manusia yang diawali melalui pemantapan pendidikan dasar
- Peningkatan kualitas out put Politeknik Pertanian Tembilahan
- Pembangunan Rumah Sakit Sei Guntung dan Reteh
- Rehabilitasi perkebunan kelapa rakyat

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

- Pengembangan pertanian polikultur
- Peningkatan dan pengembangan sentra produksi pertanian (padi)
- Pembangunan Pelabuhan Nasional Pulau Burung
- Pembangunan jembatan Teluk Pinang
- Review Tata Ruang Kabupaten
- Pembangunan Pasar Rakyat Sungai Guntung
- Pengembangan dan pengelolaan daerah rawa melalui peningkatan Trio Tata Air
- Pembangunan dan peningkatan jalan dalam rangka membuka isolasi daerah pedesaan (sharing dengan Propinsi)

3) KEBIJAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

- Rehabilitasi prasarana pendidikan dasar
- Bantuan prasarana infrastruktur pedesaan
- Program di atas bertujuan;
- Membangkitkan partisipasi dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan
- Membangkitkan kembali swadaya dan semangat gotong royong serta rasa memiliki terhadap hasil pembangunan
- Mendidik dan memberdayakan kelembagaan masyarakat
- Pengejawantahan dari UU 32 dan 33 Tahun 2004 untuk melimpahkan sebahagian kewenangan dalam rangka penerapan otonomi desa.

**f. Pemerintahan**

Pada tahun 2005, Wilayah administrasi daerah ini terdiri dari 20 kecamatan, 18 kelurahan dan 174 desa. Pada tahun 2011, jumlah kelurahan dan desa di Indragiri Hilir mengalami penambahan karena adanya pemekaran desa yaitu menjadi 203 desa dan 33 kelurahan. Berikut ini nama kecamatan, ibukota kecamatan, jumlah desa, jumlah

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

kelurahan, jumlah RW dan jumlah RT di Kabupaten Indragiri Hilir pada Akhir Tahun 2012.

**Tabel 5.1 Nama kecamatan, ibukota kecamatan, jumlah desa, jumlah kelurahan, jumlah RW dan jumlah RT di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012**

| Kecamatan | Ibukota Kecamatan | Jumlah Desa | Jumlah Kelurahan | Jumlah RW | Jumlah RT |
|---|---|---|---|---|---|
| Keritang | Kotabaru Reteh | 17 | 0 | 110 | 491 |
| Kemuning | Selensen | 12 | 0 | 55 | 153 |
| Reteh | Pulau Kijang | 11 | 3 | 184 | 326 |
| Sungai Batang | Benteng | 7 | 1 | 41 | 112 |
| Enok | Enok | 10 | 4 | 82 | 296 |
| Tanah Merah | Kuala Enok | 9 | 1 | 50 | 163 |
| Kuala Indragiri | Sapat | 7 | 1 | 51 | 146 |
| Concong | Concong Luar | 6 | 0 | 35 | 113 |
| Tembilahan | Tembilahan Hilir | 0 | 8 | 64 | 251 |
| Tembilahan Hulu | Tembilahan Hulu | 4 | 2 | 54 | 161 |
| Tempuling | Sungai Salak | 5 | 4 | 51 | 182 |
| Kempas | Harapan Tani | 11 | 1 | 94 | 252 |
| Batang Tuaka | Sungai Piring | 12 | 1 | 66 | 253 |
| Gaung Anak Serka | Teluk Pinang | 10 | 2 | 59 | 215 |
| Gaung | Kuala Lahang | 16 | 0 | 91 | 354 |
| Mandah | Khairiah Mandah | 16 | 1 | 107 | 325 |
| Kateman | Tagaraja | 8 | 3 | 61 | 314 |
| Pelangiran | Pelangiran | 15 | 1 | 91 | 310 |
| Teluk Belengkong | Saka Rotan | 13 | 0 | 63 | 193 |
| Pulau Burung | Pulau Burung | 14 | 0 | 83 | 210 |

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintahan Desa Kab. Inhil, Tahun 2013

**g. Kependudukan dan Ketenagakerjaan**

Masalah kependudukan di Kabupaten Indragiri Hilir sama halnya seperti daerah lain di Indonesia, dimana untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai. Program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bagi bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang harus ditingkatkan.

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

Penduduk pada tahun 2012 bertambah menjadi 689.938 jiwa. Rata-rata jiwa per rumah tangga adalah 4 jiwa, tidak berubah dari tahun sebelumnya karena kenaikan jumlah penduduk diikuti dengan kenaikan jumlah rumah tangga. Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah Kecamatan Tembilahan yaitu 72.424 jiwa dan kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Sungai Batang yaitu 12.320 jiwa. Kepadatan penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir adalah 59 jiwa per $km^2$. Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah di Kecamatan Tembilahan yaitu 367 jiwa per $km^2$, sedangkan kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah kecamatan batang tuaka dengan tingkat kepadatan 26 jiwa per $km^2$.

Berikut ini adalah gambaran banyaknya desa, luas wilayah, jumlah rumah tangga dan jumlah penduduk menurut kecamatan pada Tahun 2012:

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

**Tabel 5.2 Banyaknya desa, luas wilayah, jumlah rumah tangga dan jumlah penduduk menurut kecamatan Tahun 2012**

| Kecamatan | Jumlah Desa | Luas ($Km^2$) | Rumah Tangga | Penduduk | Kepadatan Penduduk (orang/$km^2$) | Rata-rata Jiwa Per Rumah Tangga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keritang | 17 | 543,45 | 15.513 | 64.017 | 118 | 4 |
| Kemuning | 12 | 525,48 | 7.745 | 30.893 | 59 | 4 |
| Reteh | 11 | 407,75 | 10.787 | 43.972 | 108 | 4 |
| Sungai Batang | 7 | 145,99 | 2.987 | 12.320 | 84 | 4 |
| Enok | 10 | 880,86 | 8.816 | 34.344 | 39 | 4 |
| Tanah Merah | 9 | 721,56 | 7.580 | 31.197 | 43 | 4 |
| Kuala Indragiri | 7 | 511,63 | 4.757 | 19.467 | 38 | 4 |
| Concong | 6 | 160,29 | 3.256 | 13.339 | 83 | 4 |
| Tembilahan | 0 | 197,37 | 16.991 | 72.424 | 367 | 4 |
| Tembilahan Hulu | 4 | 180,62 | 10.322 | 44.434 | 246 | 4 |
| Tempuling | 5 | 691,19 | 7.840 | 30.767 | 45 | 4 |
| Kempas | 11 | 364,49 | 8.701 | 33.962 | 93 | 4 |
| Batang Tuaka | 12 | 1.050,25 | 6.542 | 27.415 | 26 | 4 |
| Gaung Anak Serka | 10 | 612,75 | 5.389 | 22.229 | 36 | 4 |
| Gaung | 16 | 1.479,24 | 9.285 | 40.168 | 27 | 4 |
| Mandah | 16 | 1.021,74 | 10.087 | 40.177 | 39 | 4 |
| Kateman | 8 | 561,09 | 11.239 | 45.641 | 81 | 4 |
| Pelangiran | 15 | 531,22 | 11.581 | 43.890 | 83 | 4 |
| Teluk Belengkong | 13 | 499,00 | 4.889 | 16.797 | 34 | 3 |
| Pulau Burung | 14 | 520,00 | 6.455 | 22.485 | 43 | 3 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

Dilihat dari komposisinya penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan. Penduduk laki-laki berjumlah 354.748 jiwa penduduk perempuan berjumlah 335.190 jiwa dengan sex ratio sebesar 105,83. Kecamatan yang memiliki sex ratio tertinggi adalah di kecamatan Pelangiran yaitu 122,96 dan yang paling rendah adalah kecamatan Reteh yaitu 99,90.

Mengenai ketenagakerjaan, sebagian besar penduduk bekerja di bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan yakni sebanyak 231. 250 jiwa dengan persentase 75,87%. Berikut ini adalah persentase penduduk bekerja menurut sektor pada tahun 2012:

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

**Tabel 5.3 Persentase penduduk bekerja menurut sektor Tahun 2012**

| Bekerja | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan | 231.250 | 75.87 |
| Pertambangan dan Penggalian | 438 | 0.14 |
| Industri | 13.079 | 4.29 |
| Listrik, Gas dan Air Minum | 360 | 0.12 |
| Konstruksi | 4.394 | 1.44 |
| Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi | 27.825 | 9.13 |
| Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi | 8.379 | 2.75 |
| Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan | 1.728 | 0.57 |
| Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan | 17.339 | 5.69 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

**2. Kabupaten Bengkalis**

a. **Sejarah Singkat Kabupaten Bengkalis**

Secara historis wilayah Kabupaten Bengkalis sebelum Indonesia merdeka, sebagian besar berada di wilayah pemerintahan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Setelah diproklamirkannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan diikuti dengan penyerahan kekuasaan oleh Raja Kerajaan Siak Sri Indrapura Sultan Syarif Kasim II, maka seluruh wilayah yang berada dibawah kekuasaan Kerajaan Siak Sri Indrapura, termasuk wilayah Kabupaten Bengkalis berada di bawah pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian pada tahun 1956 yakni berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 dibentuklah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, yang pada waktu itu masih berada dibawah Propinsi Sumatera Tengah dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Sumatera Utara. Dengan dibentuknya Propinsi Daerah Tingkat I Riau berdasarkan Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Penetapan Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Riau dan Jambi, maka Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis berada dalam Propinsi Daerah Tingkat I Riau.

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

b. **Visi dan Misi**

**VISI KABUPATEN BENGKALIS :**

" MENJADI SALAH SATU PUSAT PERDAGANGAN DI ASIA TENGGARA DENGAN DUKUNGAN INDUSTRI YANG KUAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL GUNA MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DAN MAKMUR PADA TAHUN 2020 "

**VISI KABUPATEN BENGKALIS 2010-2015 :**

" TERCAPAINYA MASYARAKAT YANG UNGGUL, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERTAQWA DENGAN MENWUJUDKAN KABUPATEN BENGKALIS SEBAGAI SALAH SATU DAERAH OTONOM TERBAIK DI INDONESIA TAHUN 2015 "

**MISI** :

- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kependudukan dan ketenagakerjaan;
- Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, perekonomian pedesaan serta kelompok masyarakat minoritas dan terpinggirkan;
- Mengembangkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui peningkatan investasi dan usaha mikro, kecil dan menengah dengan memanfaatkan sumber daya alam yang terbarukan.
- Meningkatkan infrastruktur daerah melalui prasarana jalan,jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan, dan ;
- Mengimplementasikan desentralisasi politik, keuangan, dan administrasi dalam sistem pemerintahan daerah melalui pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik (good governance ).

Sebagai upaya untuk lebih memberikan pedoman bagi focus-fokus prioritas dalam melaksanakan misi guna mencapai visi telah ditetapkan

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

grand strategi yang menyajikan program dan kegiatan yang dianggap merupakan program dan kegiatan prioritas. Grand strategi ini terdiri dari grand strategy pengembangan empat kawasan dan enam jaminan.

1) Grand Strategi Pengembangan Empat Kawasan

   Guna mendukung pencapaian kelima misi disiapkan grand strategi pengembangan empat kawasan yang terdiri dari :

   a) Kawasan Pusat pendidikan dan Agribisnis di Pulau bengkalis
   b) Kawasan Pusat Industri, Pelabuhan dan Agroindustri di Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan siak Kecil
   c) Kawasan Pariwisata dan Agribisnis di Pulau Rupat
   d) Kawasan Kota Transit dan Petropolitan di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir

2) Grand Strategi Enam Jaminan pada Masyarakat

   Selain grand strategi pengembangan kawasan juga ditetapkan enam jaminan kepada masyarakat sebagai berikut :

   a) Jaminan berusaha masyarakat dan pengentasan kemiskinan
   b) Jaminan pendidikan, peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru
   c) Jaminan kesehatan dan keluarga sejahtera
   d) Jaminan akses infrastruktur dasar
   e) Jaminan pelayanan public, pembinaan birikrasi dan kelembagaan daerah
   f) Jaminan pemerataan dan percepatan pembangunan daerah

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

c. **Lambang Daerah**

**Gambar 5.4 Lambang Daerah Kabupaten Bengkalis**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Nomor 16 tahun 1989 tentang Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, yaitu :

1) Bentuk Dan Pembagian Lambang

Lambang Daerah berbentuk Perisai yang terdiri dari lima bagian, yaitu :

a) Rotan yang melingkar seluruh Lambang dengan jumlah ruas 17;
b) Perahu layar dengan layar terkembang dan laut yang bergelombang lima;
c) Pohon Rumbia dengan 4 pelepah, dan
d) Pohon Para dengan 4 helai daun, sehingga berjumlah 8;
e) Ikan Terubuk dengan jumlah sisik 45.

Warna Utama yang dipakai adalah Hijau Muda disamping menggunakan warna kuning, putih, biru tua dan hitam, Pemberian warna lambang, yaitu :

a) Rotan yang melingkari seluruh Lambang adalah warna kuning;
b) Perahu layar dengan layar terkembang dan laut yang bergelombang lima adalah warna putih;
c) Pohon rumbia dengan 4 pelepah, dan
d) Pohon Para dengan 4 helai daun, adalah warna biru tua;

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

e) Ikan Terubuk adalah warna kuning.

2) Arti Lambang

a) Rotan melingkar yang berjumlah 17 ruas mengingatkan tanggal Proklamasi, dan melambangkan Persatuan dan Kesatuan Penduduk Daerah;

b) Perahu layar dengan layar terkembang melambangkan sarana utama perhubungan dan pengambilan hasil laut, berarti lambing wilayah perairan yang terdiri dari pada laut dan sungai, serta gelombang lima lapis melambangkan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia;

c) Pohon Rumbia dan Pohon Para masing-masing terdiri dari 4 pelepah dan 4 helai daun sehingga berjumlah 8, mengingatkan pada bulan Proklamasi, dan melambangkan kesuburan tanah sebagai penghasil pangan yang potensial, berarti lambang ketahanan pangan dimasa sulit, dan melambangkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan untuk hubungan perdagangan ke luar Daerah;

d) Ikan Terubuk dengan jumlah sisik 45, mengingatkan tahun Proklamasi, dan melambangkan wilayah perairan penghasilan ikan berarti lambang hasil laut yang potensial.

d. **Kondisi Umum**

Wilayah Kabupaten Bengkalis terletak pada bagian pesisir Timur Pulau Sumatera antara 207’37,2” - 0055’33,6” Lintang Utara dan 100057’57,6” - 102030’25,2” Bujur Timur. Kabupaten Bengkalis memiliki batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kota Dumai.

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka dan Kabupaten Kep.Meranti Wilayah Kabupaten Bengkalis dialiri oleh beberapa sungai.

Diantara sungai yang ada di daerah ini yang sangat penting sebagai sarana perhubungan utama dalam perekonomian penduduk adalah Sungai Siak dengan panjang 300 km, Sungai Siak Kecil 90 km dan Sungai Mandau 87 km. Luas wilayah Kabupaten Bengkalis 7.773,93 $km^2$, terdiri dari pulau-pulau dan lautan. Tercatat sebanyak 17 pulau utama disamping pulau-pulau kecil lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Bengkalis. Jika dirinci luas wilayah menurut kecamatan dan dibandingkan dengan luas Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Pinggir merupakan kecamatan yang terluas yaitu 2.503 $km^2$ (32,20%) dan kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Bantan dengan luas 424,4 km2 (5,46%). Berikut ini adalah peta citra dan administrasi kecamatan di Kabupaten Bengkalis:

**Gambar 5.5 Peta Citra Kabupaten Bengkalis**

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

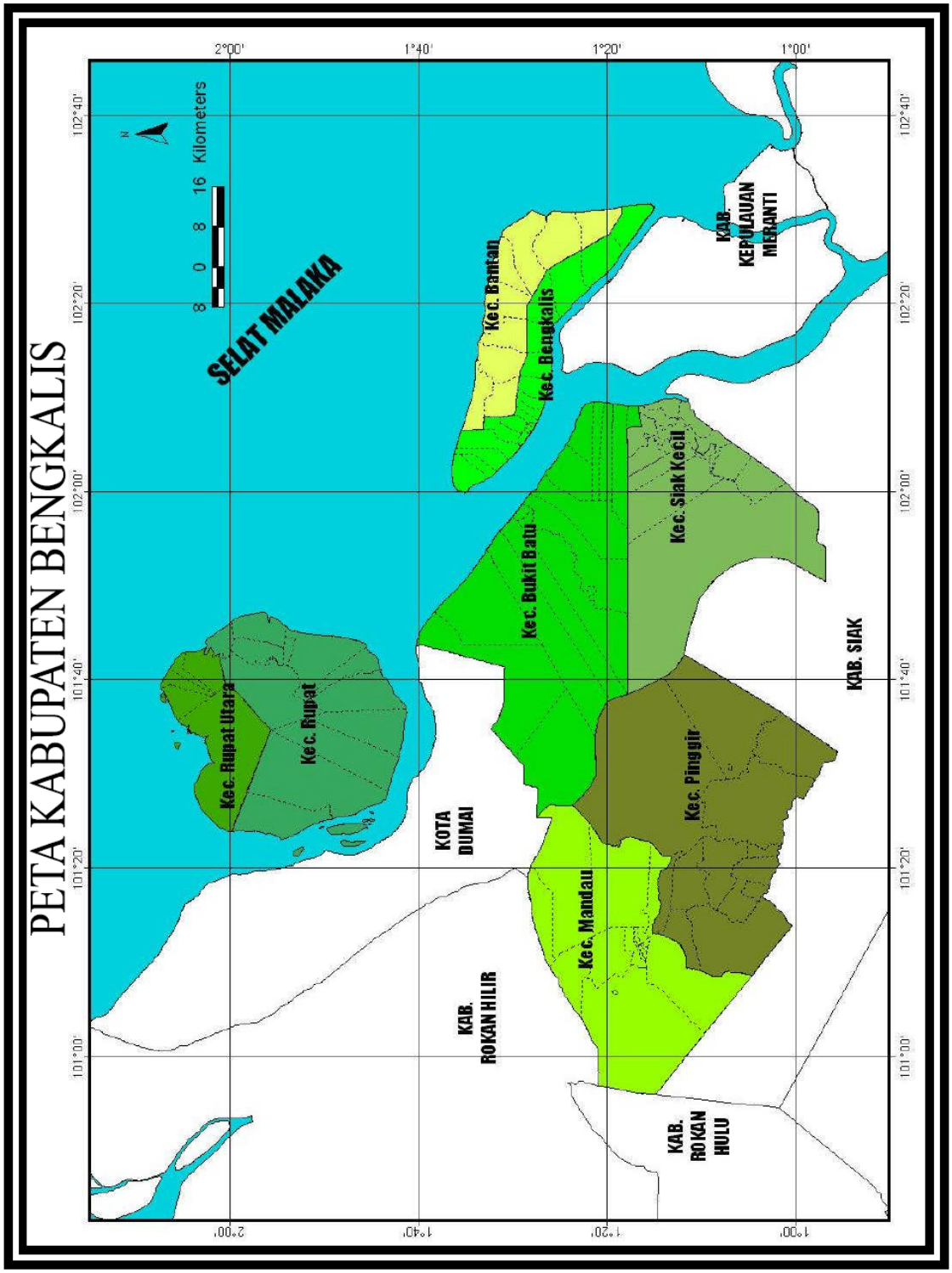


**Gambar 5.6 Peta Kabupaten Bengkalis**

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

e. **Pemerintahan**

Pada mulanya Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 Lembaran Negara Nomor 25 tahun 1956 dengan ibukotanya Bengkalis. Pada tahun 1999 Kota Administratif Dumai meningkat statusnya menjadi Kota Dumai. Pada tahun 2000 terjadi lagi pemekaran, Kabupaten Bengkalis dimekarkan menjadi tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak dan Kabupaten Rokan Hilir. Dan Pada awal 2009 Kabupaten Bengkalis kembali dimekarkan menjadi Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Jumlah kecamatan di wilayah

Kabupaten Bengkalis sebanyak 8 kecamatan yang terdiri dari 102 desa/kelurahan. Kecamatan yang memiliki jumlah desa/kelurahanterbanyak adalah Kecamatan Bengkalis dengan 20 desa/ kelurahan dan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan terkecil adalah Kecamatan Rupat Utara dengan 5 desa/kelurahan. Pemerintahan Kabupaten Bengkalis dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Bupati. Hingga Desember 2012 tercatat sebanyak 8.131 Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis baik di lingkungan Kabupaten maupun Kecamatan.

Jumlah Rukun Warga pada tahun 2012 mengalami penurunan dari 682 pada tahun 2011 menjadi 673 RW. Akan tetapi jumlah Rukuan Tetangga mengalami kenaikan dari 2.185 RT pada tahun 2011 menjadi 2.239 RT. Berikut ini nama kecamatan, ibukota kecamatan, jumlah desa, jumlah kelurahan, jumlah RW dan jumlah RT di Kabupaten Bengkalis pada Akhir Tahun 2012.

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

**Tabel 5.4 Nama kecamatan, ibukota kecamatan, jumlah desa, jumlah kelurahan, jumlah RW dan jumlah RT di Kabupaten Bengkalis Tahun 2012**

| Kecamatan | Ibukota Kecamatan | Jumlah Desa | Jumlah Kelurahan | Jumlah RW | Jumlah RT |
|---|---|---|---|---|---|
| Mandau | Duri | 6 | 9 | 159 | 698 |
| Pinggir | Pinggir | 11 | 2 | 79 | 346 |
| Bukit Batu | Sungai Pakning | 14 | 1 | 75 | 183 |
| Siak Kecil | Lubuk Muda | 13 | 0 | 80 | 171 |
| Rupat | Batu Panjang | 8 | 4 | 77 | 188 |
| Rupat Utara | Tanjung Medang | 5 | 0 | 30 | 73 |
| Bengkalis | Bengkalis Kota | 17 | 3 | 104 | 313 |
| Bantan | Selat Baru | 9 | 0 | 69 | 267 |
| **Jumlah** | | **83** | **19** | **673** | **2.239** |

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkalis, Tahun 2013

Penduduk Kabupaten Bengkalis pada tahun 2012 tercatat sebanyak 530.191 jiwa yang terdiri 273.640 jiwa laki-laki dan 256.551 jiwa perempuan. Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah Kecamatan Mandau yaitu 233.394 jiwa dan kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Rupat Utara yaitu 13.737 jiwa.

Kecamatan di Kabupaten Bengkalis yang terpadat pada tahun 2012 yaitu Kecamatan Mandau dengan tingkat kepadatan mencapai 249 jiwa per kilometer persegi, sedangkan Kecamatan Rupat Utara merupakan kecamatan yang paling jarang penduduknya dengan tingkat kepadatan 22 jiwa per kilometer persegi. Berikut ini adalah gambaran banyaknya desa, luas wilayah, jumlah rumah tangga dan jumlah penduduk menurut kecamatan pada Tahun 2012:

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

**Tabel 5.5 Banyaknya desa, luas wilayah, jumlah rumah tangga dan jumlah penduduk menurut kecamatan Tahun 2012**

| Kecamatan | Jumlah Desa | Luas ($Km^2$) | Rumah Tangga | Penduduk | Kepadatan Penduduk (orang/$km^2$) | Rata-rata Jiwa Per Rumah Tangga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandau | 15 | 937,47 | 63.595 | 233.394 | 249 | 4 |
| Pinggir | 13 | 2.503,00 | 24.611 | 88.358 | 35 | 4 |
| Bukit Batu | 15 | 1.128,00 | 9.215 | 32.123 | 38 | 3 |
| Siak Kecil | 13 | 742,21 | 6.088 | 19.463 | 36 | 3 |
| Rupat | 12 | 896,35 | 9.856 | 31.456 | 45 | 3 |
| Rupat Utara | 5 | 628,50 | 4.034 | 13.737 | 22 | 3 |
| Bengkalis | 20 | 514,00 | 25.727 | 75.101 | 146 | 3 |
| Bantan | 9 | 424,40 | 12.035 | 36.559 | 86 | 3 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis

Dilihat komposisinya, penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan. Penduduk laki-laki sebanyak 51,61 persen dan penduduk perempuan 48,39 persen. Rasio jenis kelamin terlihat cukup berimbang yaitu 107. Rasio jenis kelamin yang paling tinggi terdapat di Kecamatan Mandau yaitu 108 dan rasio jenis kelamin yang paling rendah terdapat di Kecamatan Bengkalis dan Bantan yaitu 104.

Sedangkan penyebaran penduduk yang terbanyak adalah di Kecamatan Mandau yaitu 44,02 % dan penyebaran yang terendah di Kecamatan Rupat Utara yaitu 2,59 % dari jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis.

Dibandingkan dengan tahun 2011, penduduk kabupaten Bengkalis mengalami pertumbuhan sebesar 2,68 %

Di bidang ketenagakerjaan, Pertanian masih menjadi lapangan usaha utama mayoritas penduduk di Kabupaten Bengkalis dengan persentase sebesar 37,86%. Sedang listrik dan air minum merupakan lapangan usaha yang memiliki persentase paling kecil di Kabupaten Bengkalis.

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

## B. Produksi Perikanan Perairan

### 1. Kabupaten Indragiri Hilir

Peluang investasi bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri dari penangkapan di perairan laut, budidaya air payau (tambak), budidaya laut (keramba jaring apung), budidaya air tawar (minatani) dan pengolahan tepung ikan. Berikut ini sumber potensi dan tingkat pemanfaatan perairan/lahan kelautan dan perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012:

**Tabel 5.6 Sumber potensi dan tingkat pemanfaatan perairan/lahan kelautan dan perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012**

| Aspek Sumber Daya | Potensi | Pemanfaatan | Tingkat Pemanfaatan |
|---|---|---|---|
| **I. Sumberdaya Penangkapan** | | | |
| - Perairan Laut | 109.212 | 40.096,13 | 36,71% |
| - Perairan Umum | 2.600 | 3.096,05 | 119,08% |
| **II. Budidaya Perikanan** | | | |
| 1. Budidaya Air Tawar | | | |
| - Kolam (Ha) | 1.657 | 285,50 | 17,23% |
| - Keramba (Unit) | 3.500 | 20 | 0,57% |
| - Mina Tani (Ha) | 17.000 | 122 | 0,72% |
| 2. Budidaya Air Tawar (Ha) (Tambak) | 31.600 | 1.409 | 4,46% |
| 3. Budidaya Laut (unit) (Kejapung) | 20.000 | - | 0,00% |
| 4. Budidaya Pantai (Ha) (Kerang) | 2.500 | - | 0,00% |

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir

Dari tabel diatas diketahui bahwa potensi perikanan tangkap di perairan laut sebesar 109,212 ton/th dengan tingkat pemanfaatan pada tahun 2012 sebesar 40.096,13 ton/th (36,71%), dibidang budidaya perikanan daerah ini memiliki potensi lahan untuk pengembangan budidaya tambak seluas 31.600 ha dengan tingkat pemanfaatan 1.409 Ha (4,42%) dan budidaya air tawar (minatani) dengan potensi sebesar 17.000 Ha baru dimanfaatkan sebesar 122 ha (0,72% ). Sementara dibidang budidaya laut berupa pemeliharaan ikan didalam keramba jaring apung (kejapung) tersedia luas areal potensial yang dapat menampung sekitar

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

20.000 kantong keramba, dimana sampai saat ini belum termanfaatkan. Begitu juga dengan budidaya pantai yang mempunyai potensi pemanfaatan kerang sebesar 2.500 Ha, dimana sampai saat ini belum termanfaatkan.

Sedangkan rumah tangga perikanan perairan laut dan produksi perikanan laut di Kabupaten Indragiri Hilir berjumlah sebanyak 9.391 rumah tangga yang pada tahun 2012 memproduksi 40.096,13 ton hasil laut, dan 3.096,50 hasil perairan umum. Berikut ini persebaran banyaknya Rumah Tangga Perikanan Perairan Laut dan Produksi Perikanan Laut di Kabupaten Indragiri Hilir.

**Tabel 5.7 Banyaknya Rumah Tangga Perikanan Perairan Laut dan Produksi Perikanan Laut di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012**

| Kecamatan | Jumlah Rumah Tangga Perikanan | Produksi Perikanan Laut | Produksi Perikanan Perairan Umum |
|---|---|---|---|
| Keritang | 431 | 0 | 211,3 |
| Kemuning | 381 | 0 | 68,23 |
| Reteh | 713 | 2.374,14 | 71,12 |
| Sungai Batang | 97 | 2.997,61 | 86,61 |
| Enok | 519 | 0 | 347,71 |
| Tanah Merah | 1.099 | 10.613,03 | 121,62 |
| Kuala Indragiri | 1.115 | 6.010,62 | 62,62 |
| Concong | 334 | 7.697,77 | 28,56 |
| Tembilahan | 470 | 0 | 180,99 |
| Tembilahan Hulu | 391 | 0 | 158,09 |
| Tempuling | 783 | 0 | 280,66 |
| Kempas | 150 | 0 | 231,31 |
| Batang Tuaka | 447 | 0 | 286,01 |
| Gaung Anak Serka | 112 | 198,73 | 38,60 |
| Gaung | 432 | 139,64 | 351,5 |
| Mandah | 1.088 | 6.286,04 | 370,3 |
| Kateman | 387 | 3.080,86 | 60,65 |
| Pelangiran | 135 | 0 | 63,98 |
| Teluk Belengkong | 151 | 0 | 68,21 |
| Pulau Burung | 156 | 700,69 | 8,40 |

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

### 2. Kabupaten Bengkalis

Produksi perikanan hingga Desember 2012 berjumlah 9.229,94 ton, yang terdiri perikanan laut 8.745,93 ton, perikanan air tawar 158,4 ton, dan budidaya kolam 325,6 ton. Jumlah rumah tangga nelayan/perikanan pada tahun 2012 antara lain untuk perikanan laut dan darat masing-masing 3.295 dan 413 rumah tangga, sedang budidaya kolam dan tambak masing-masing 2.628 dan 110 rumah tangga.

Berikut ini persebaran banyaknya Rumah Tangga Perikanan Perairan Laut dan Produksi Perikanan Laut di Kabupaten Bengkalis:

**Tabel 5.8 Banyaknya Rumah Tangga Perikanan Perairan Laut dan Produksi Perikanan Laut di Kabupaten Bengkalis Tahun 2012**

| Kecamatan | Jumlah Rumah Tangga Perikanan | Produksi Perikanan Laut | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Tangkap | Tambak | Keramba |
| Mandau | 1.044 | 0 | 0 | 0 |
| Pinggir | 983 | 0 | 0 | 0 |
| Bukit Batu | 589 | 936 | 0 | 0 |
| Siak Kecil | 324 | 123 | 0 | 0 |
| Rupat | 827 | 1.602 | 0,4 | 0,3 |
| Rupat Utara | 600 | 2.305 | 0,1 | 0 |
| Bengkalis | 954 | 1.854 | 3,4 | 0 |
| Bantan | 1.153 | 1.905 | 6,7 | 0 |
| **Jumlah** | **6.474** | **8.735** | **10,6** | **0,3** |

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis

## C. Karakteristik Responden

### 1. Umur Responden

Responden berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel 5.9. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa ada 40 orang (25,16%) berusia kurang dari 30 tahun dari keseluruhan responden di 2 (dua) wilayah, sebanyak 43 orang (27,04%) responden berusia antara 30-39 tahun, sebanyak 35 orang (22,01%) responden berusia antara 40-49 tahun, dan 41 orang (25,79%) berusia lebih dari 49 tahun.

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

**Tabel 5.9 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur**

| Umur | Wilayah | | | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bengkalis | | Indragiri Hilir | | | |
| | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % |
| < 30 tahun | 16 | 20.25 | 24 | 30.00 | 40 | 25.16 |
| 30-39 tahun | 21 | 26.58 | 22 | 27.50 | 43 | 27.04 |
| 40-49 tahun | 17 | 21.52 | 18 | 22.50 | 35 | 22.01 |
| > 49 tahun | 25 | 31.65 | 16 | 20.00 | 41 | 25.79 |
| Jumlah Total | 79 | **100.00** | 80 | **100.00** | 159 | **100.00** |

Sumber: Data Primer yang diolah (2014)

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa responden yang berada pada tingkat usia muda jumlahnya relatif cukup besar yaitu rata-rata jumlah di setiap wilayah di atas 40,00%. Hal ini menandakan bahwa umumnya masyarakat yang terlibat dalam jenis pekerjaan sektor perikanan di Indragiri Hilir dan Bengkalis adalah mereka yang berusia muda (< 30 tahun), di mana hal ini merupakan salah satu keunggulan bagi sektor tersebut terutama untuk potensi pengembangannya di masa yang akan datang karena memiliki pekerja dengan tingkat usia produktif yang cukup panjang. Artinya, usia pekerja yang masih relatif muda tersebut dapat berpengaruh pada produktifitas kerja di satu sisi, dan merupakan modal manusia yang sangat penting dalam pengembangan sektor ini di masa datang karena masa usia produktif pekerja yang panjang di sisi lain, sehingga korelasi positif antara tingkat usia dengan produktifitas dapat berlangsung lama sebelum sampai pada masa usia tidak produktif lagi.

**2. Tingkat Pendidikan Responden**

Responden berdasarkan tingkat pendidikan formal, dapat dilihat pada tabel 5.10. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa ada 86 orang (54,09%) berpendidikan SD/Sederajat, 43 orang (27,04%) berpendidikan SMA/Sederajat, 23 orang (14,47%) berpendidikan SMP/Sederajat, 5 orang (3,14%) tidak berijasah, 1 orang (0,63%) berpendidikan DIII dan 1 orang (0,63%) berpendidikan S1.

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

**Tabel 5.10 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

| Pendidikan | Wilayah | | | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bengkalis | | Indragiri Hilir | | | |
| | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % |
| Tidak Sekolah | 4 | 5.06 | 1 | 1.25 | 5 | 3.14 |
| SD/Sederajat | 54 | 68.35 | 32 | 40 | 86 | 54.09 |
| SMP/Sederajat | 7 | 8.86 | 16 | 20 | 23 | 14.47 |
| SMA/Sederajat | 13 | 16.46 | 30 | 37.5 | 43 | 27.04 |
| DIII | 1 | 1.27 | 0 | 0 | 1 | 0.63 |
| S1 | 0 | - | 1 | 1.25 | 1 | 0.63 |
| **Jumlah Total** | **79** | **100.00** | **80** | **100.00** | **159** | **100.00** |

Sumber: Data Primer yang diolah (2014)

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata pendidikan formal responden yang dalam hal ini nelayan masih relatif rendah, di mana mereka yang berpendidikan hanya tamat SD/Sederajat mendominasi jumlah keseluruhan nelayan, kemudian disusul oleh yang tamat SMA/Sederajat.

Sedangkan nelayan yang tamat Diploma dan Sarjana jumlahnya relatif lebih sedikit. Hal ini berimplikasi bahwa faktor pendidikan formal memang belum atau bahkan tidak dibutuhkan dalam jenis pekerjaan nelayan sebagai salah satu kegiatan ekonomi pada sektor perikanan di Indragiri Hilir dan Bengkalis. Oleh karena itu, hal ini perlu mendapat perhatian bagi pemerintah terkait terutama di dalam mengkaji mengenai dampak jangka panjang terhadap perkembangan sektor ekonomi di bidang perikanan, khususnya yang berkaitan langsung dengan kegiatan penangkapan ikan yang saat ini belum membutuhkan tenaga kerja berpendidikan. Hal ini menjadi sangat penting karena ada hubungannya dengan berpotensi tidaknya sektor ini mempertahankan kontinuitasnya.

Asumsinya adalah pendidikan yang tinggi dapat meningkatkan kemampuan kerja sehingga produktifitas naik dan dapat meningkatkan kontribusi sektor ini bagi kesejahteraan masyarakat pesisir di satu pihak, dan pendidikan tinggi yang dimiliki tersebut merupakan modal manusia

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

yang dapat dimanfaatkan pada jenis pekerjaan yang lain ketika pekerjaan sebagai nelayan pada sektor perikanan ini tidak dapat berlangsung lama yang kemungkinan disebabkan banyak faktor di pihak lain. Salah satunya adalah perubahan struktur ekosistem kelautan sebagai akibat eksternalitas negatif pertumbuhan di sektor-sektor industri lainnya, seperti transportasi laut dan sebagainya, pergeseran fungsi lahan pemukiman yang terjadi akibat pengembangan wilayah untuk sekor-sektor publik, serta dampak dari faktor demografi, dan sebagainya.

## D. Persepsi Responden terhadap Variabel Laten

Untuk mengetahui lebih jelas pengaruh variabel laten satu dengan variabel laten lainnya sesuai dengan analisis sebelumnya yang rnerupakan temuan penelilian akan dibahas satu persatu, namun sebelumnya terlebih dahulu diuraikan mengenai persepsi responden terhadap variabel laten tersebut.

Penelitian ini menggunakan tiga variabel laten yang diuji hubungannya yaitu pemberdayaan, modal sosial,dan kesejahteraan.Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk melihat terlebih dahulu bagaimana persepsi responden yang dalam halini nelayan di dalam memaknai ketiga variabel laten tersebut. Adapun cara pengukurannya menggunakan skala likert dengan rentang nilai 1 sampai dengan 5. Semakin mendekati nilai 5 jawaban responden dari item pernyataan yang diajukan, kriteria jawaban semakin setuju, sedangkan nilai yang semakin mendekati angka 1 adalah sebaliknya, yaitu semakin tidak setuju.

### 1. Persepsi Nelayan Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)

Pemberdayaan ekonomi masyaakat pesisir (PEMP) adalah salah satu program pemerintah yang digulirkan di dalam upaya mengentaskan masalah kemiskinan yang terjadi pada sebagian kelompok masyarakat miskin di wilayah pesisir di Indonesia termasuk di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Bengkalis. Melalui program ini diharapkan kesejahteraan masyarakat pesisir berkembang melalui pemberian modal usaha, pendirian

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

kedai pesisir, pembentukan lembaga keuangan mikro (LKM), dan penyediaan SPDN.

**Tabel 5.11 Skor Rata-Rata indikator Pemberdayaan EMP**

| Sub Variabel | Indikator | Rata-rata | Skor Total | Skor Rata-rata |
|---|---|---|---|---|
| Modal Usaha (X1.1) | X1.1.1 | 4,43 | | |
| | X1.1.2 | 3,47 | | |
| | X1.1.3 | 4,23 | | |
| | X1.1.4 | 3,57 | 15,70 | 3,93 |
| Kedai Pesisir (X1.2) | X1.2.1 | 3,28 | | |
| | X1.2.2 | 3,50 | | |
| | X1.2.3 | 3,49 | | |
| | X1.2.4 | 3,74 | | |
| | X1.2.5 | 3,42 | 17,43 | 3,49 |
| LKM (X1.3) | X1.3.1 | 3,42 | | |
| | X1.3.2 | 3,33 | | |
| | X1.3.3 | 3,39 | | |
| | X1.3.4 | 3,10 | 13,23 | 3,31 |
| SPDN (X1.4) | X1.4.1 | 3,77 | | |
| | X1.4.2 | 3,78 | | |
| | X1.4.3 | 3,81 | | |
| | X1.4.4 | 3,88 | | |
| | X1.4.5 | 3,76 | 18,99 | 3,80 |
| **Pemberdayaan** | | | | **3,63** |

Sumber: Data Primer yang diolah, Tahun 2014

Berdasarkan hasil rekap pada Tabel 5.11 yang diperoleh dari tanggapan atau persepsi dari 159 orang responden tentang program PEMP yang telah dilaksanakan selama ini diketahui bahwa secara keseluruhan dari program tersebut yang terdiri atas lima bentuk pemberdayaan belum berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan nilai skor rata-rata dari variabel pemberdayaan yang relatif **(3,63).**

Pemberian bantuan modal usaha serta pendirian kedai pesisir, LKM, dan SPDN belum merata. Pemberian bantuan modal usaha tersebut dapat memudahkan mereka mengatasi masalah-masalah yang dihadapi seperti kurangnya modal kerja. Sehingga jarang melaut, tidak tersedianya sembako untuk kebutuhan sehari-hari sehingga harus meninggalkan pekerjaan utama (melaut) untuk membeli sembako di luar kampung pesisir,dan sulitnya

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

memperoleh bahan bakar minyak untuk keperluan kapal motor. Kehadiran program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP) sangat banyak berarti bagi masyarakat pesisir karena telah banyak membantu mengatasi masalah-masalah sebagaimana disebutkan di atas dan dapat meningkatkan gairah kerja yang lazim dilakukan secara bersama-sama sehingga hal ini tentu akan menentukan keberadaan modal sosial masyarakat tersebut.

Namun demikian, program PEMP yang dilaksanakan selama ini belum tentu mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat pesisir itu sendiri. Hal ini terkait sudah sejauhmana program PEMP dapat dijalankan secara profesional, masyarakat yang diberdayakan sebagai pengelola usaha dan sudah sejauhmana kontinuitas program tersebut dikucurkan. Di balik harapan dari keberhasilan program PEMP, kurangnya sumberdaya manusia menjadi momok dari program itu sendiri. Ketidakberhasilan program mencapai hasil yang ditargetkan sudah menjadi kelaziman disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dari objek sasaran program apalagi sebagian besar dari item kerja sebagai nelayan membutuhkan tenaga berpendidikan formal. Sementara dari kegiatan pelaksanaan program PEMP membutuhkan tenaga terdidik minimal SMU atau sederajat untuk mengelola administrasi kegiatan program.

**2. Persepsi Nelayan Terhadap Modal Sosial**

Sebagaimana pemberdayaan EMP, modal sosial dalam penelitian ini juga merupakan faktor yang diamati pengaruhnya terhadap kesejahteraan. Indikator yang digunakan didalam mengukur kekuatan modal sosial yang dimiliki nelayan terdiri atas lima, yaitu: timbal-balik (reciprocity), norma (norms), jaringan (network), kepercayaan (trust), dan kelompok (group). Kelima indikator ini didekati dengan masing-masing dimensi dalam bentuk item pernyataan yang diajukan, yang tentunya dimensi tersebut diharapkan dapat mencerminkan ukuran dari eksistensi modal sosial yang tumbuh di masyarakat pesisir tersebut.

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

**Tabel 5.12 Skor Rata-Rata indikator Modal Sosial**

| Sub Variabel | Indikator | Rata-rata | Skor Total | Skor Rata-rata |
|---|---|---|---|---|
| Timbal Balik (2.1) | X2.1.1 | 3,65 | | |
| | X2.1.2 | 3,19 | | |
| | X2.1.3 | 3,97 | | |
| | X2.1.4 | 3,72 | | |
| | X2.1.5 | 3,91 | 18,44 | 3,70 |
| Norma (X2.2) | X2.2.1 | 3,38 | | |
| | X2.2.2 | 3,92 | | |
| | X2.2.3 | 3,13 | | |
| | X2.2.4 | 4,21 | | |
| | X2.2.5 | 3,51 | 18,15 | 3,63 |
| Jaringan (X2.3) | X2.3.1 | 3,83 | | |
| | X2.3.2 | 3,26 | | |
| | X2.3.3 | 3,65 | | |
| | X2.3.4 | 3,26 | | |
| | X2.3.5 | 3,51 | | |
| | X2.3.6 | 3,11 | | |
| | X2.3.7 | 3,65 | | |
| | X2.3.8 | 3,75 | | |
| | X2.3.9 | 3,74 | | |
| | X2.3.10 | 3,47 | | |
| | X2.3.11 | 3,49 | 38,72 | 3,49 |
| Kepercayaan (X2.4) | X2.4.1 | 3,32 | | |
| | X2.4.2 | 3,16 | | |
| | X2.4.3 | 3,30 | | |
| | X2.4.4 | 3,34 | | |
| | X2.4.5 | 3,84 | 10,48 | 3,39 |
| Kelompok (X2.5) | X2.5.1 | 3,47 | | |
| | X2.5.2 | 3,46 | | |
| | X2.5.3 | 3,60 | | |
| | X2.5.4 | 3,51 | | |
| | X2.5.5 | 3,52 | 17,55 | 3,51 |
| **Modal Sosial** | | | | **3,54** |

Sumber: Data Primer yang diolah, Tahun 2014

Tabe1 5.12vmerupakan hasil rekap pernyataan dari 159 orang responden. Pernyataan diberi nilai skor satu sampai lima, nilai satu adalah terendah dan angka lima adalah tertinggi. Berdasarkan hasil rekap didapatkan rata-rata Skor modal sosia1 3,54 merupakan angka yang cukup baik.

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

Hal ini menandakan bahwa modal sosial yang tumbuh dalam masyarakat nelayan di Kabupaten Indragiri Hilir dan Bengkalis memiliki potensi yang kuat terutama di dalam membangun saling tukar kebaikan antar individu nelayan dalam kelompok kerja masing-masing dan meniuniung tinggi norma-norma yang telah dibuat dan disepakati bersama, yaitu berupa aturan-aturan yang diberlakukan dalam kelompok masyarakat pesisir di dalam memajukan usaha mereka. Kuatnya modal sosial ini juga didukung oleh tingginya tingkat partisipasi nelayan sebagai anggota kelompok kerja, terjalinnya hubungan yang baik dari interaksi sosial dan individu baik di dalam maupun di luar kelompok masyarakat nelayan, serta tingginya tingkat kejujuran yang dimiliki oleh masing-masing individu sehingga menumbuhkan sikap saling percaya, konsisten dalam berperilaku, bertanggung jawab, tulus, dan saling menghargai dan menghormati.

Sebetulnya persepsi tentang modal sosial dari para responden tidak serta merta bisa dikaitkan dengan peranannya di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan sebab dua hal bisa saja berlaku, pertama meningkatnya kesejahteraan masyarakat pesisir adalah sebagai akibat kuatnya modal sosial yang dimiliki masyarakatnya. Kedua, kesejahteraan yang semakin membaik justru bukan didukung oleh keberadaan modal sosial yang tumbuh di dalam masyarakat. Meningkatnya kesejahteraan dapat saja disebabkan oleh faktor-faktor lain dan hal ini dapat dikelahui melalui pengujian-pengujian.

**3. Persepsi Nelayan Terhadap Kesejahteraan**

Kesejahteraan selalu dikaitkan dengan ketercukupan status ekonomi baik secara individual maupun komunal. Tinggi rendahnya status ekonomi bagi masyarakat bawah biasanya ditentukan dari tingkat pendapatan, pendidikan, kesehatan, kondisi rumah (layak tidaknya rumah yang ditinggal). serta kepemilikan fasilitas-fasilitas rumah tangga sebagai penunjang kehidupan, ataupun usaha. Tabel 5.12 berikut menunjukkan skor rata rata indikator kesejahteraan pada wilayah penelitian:

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

**Tabel 5.13 Skor Rata-Rata indikator Kesejahteraan**

| Sub Variabel | Indikator | Rata-rata | Skor Total | Skor Rata-rata |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Y1.1) | Y1.1.1 | 3,55 | | |
| | Y1.1.2 | 3,33 | | |
| | Y1.1.3 | 3,70 | 10,58 | 3,53 |
| Pendidikan (Y1.2) | Y1.2.1 | 3,66 | | |
| | Y1.2.2 | 3,72 | | |
| | Y1.2.3 | 3,75 | 11,13 | 3,71 |
| Kesehatan (Y1.3) | Y1.3.1 | 3,73 | | |
| | Y1.3.2 | 3,77 | | |
| | Y1.3.3 | 3,65 | 11,15 | 3,72 |
| Kondisi Rumah (Y1.4) | Y1.4.1 | 3,63 | | |
| | Y1.4.2 | 3,66 | | |
| | Y1.4.3 | 3,69 | | |
| | Y1.4.4 | 3,60 | | |
| | Y1.4.5 | 4,36 | | |
| | Y1.4.6 | 3,71 | 22,65 | 3,80 |
| Fasilitas Penunjang (Y1.5) | Y1.5.1 | 3,43 | | |
| | Y1.5.2 | 3,48 | | |
| | Y1.5.3 | 3,60 | | |
| | Y1.5.4 | 3,77 | | |
| | Y1.5.5 | 3,62 | 17,91 | 3,58 |
| **Kesejahteraan** | | | | **3,67** |

Sumber: Data Primer yang diolah, Tahun 2014

Jika diamati berdasarkan persepsi responden mengenai sejahtera yang dirasakan yang diukur melalui pendapatan, pendidikan, kesehatan, kondisi rumah dan fasilitas penunjang usaha, maka dalam hal ini masyarakat pesisir bisa dikategorikan “sejahtera”. Hal ini ditandai dengan skor rata-rata nilai yang mencapai 3,67. Kondisi sejahtera masyarakat pesisir lebih nampak pada kondisi rumah yang ditinggali dan status kesehatannya. Kepemilikan rumah yang layak huni merupakan gambaran bahwa masyarakat pesisir memiliki budaya yang tidak jauh berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya yang mendambakan rumah yang baik (idaman). Sementara jika ditarik ke realitas jumlah penghasilan masyarakat pesisir adalah jauh lebih rendah, sehingga jangankan membiayai pembangunan rumah yang layak huni, biaya kesehatan untuk anggota keluarga yang sakitpun tidak tercukupi.

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

Pola hidup sederhana yang telah membudaya secara turun temurun memungkinkan masyarakat pesisir bisa memenuhi kebutuhan rumah tinggal yang layak.

**Gambar 5.7. Kondisi Rumah sebagian Besar Masyarakat Pesisir**

Sumber: Dokumentasi Penelitian, Tahun 2014

Disamping itu, aktivitas menangkap ikan secara fisik dapat menjaga dan meningkatkan status kesehatan, sehingga bisa saja rendahnya frekwensi sakit lebih disebabkan oleh hal tersebut.

Sedangkan dari segi pendapatan bersih rata-rata antara Rp. 1.200.000 sampai dengan Rp. 3.000.000. Jumlah tersebut relatif rendah jika diperhadapkan kepada segala kebutuhan. Namun, bagi masyarakat pesisir jumlah tersebut sudah menjadikan mereka merasa sejahtera bahkan dari pendapatan tersebut mereka mampu membiayai sekolah anak-anak mereka. Hal ini ditandai dengan skor rata-rata indikator pendapatan dan pendidikan dengan nilai masing-masing **3,53 dan 3,71.**

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

## E. Hasil Analisis Jalur

**Tabel 5.14 Hasil Analisis Jalur dengan SPSS**

| **Substruktur 1** | **Substruktur 2** |
|---|---|
| Variabel Independen : Pemberdayaan<br>Variabel Dependen : Modal Sosial | Variabel Independen : Pemberdayaan , Modal Sosial<br>Variabel Dependen : Kesejahteraan |
| **Hasil Uji:** | **Hasil Uji:** |
| **1) Kelayakan Model**<br>Nilai F hitung : 238.921<br>Sig. : .000[a]<br>Nilai F tabel : 3.90<br>Alpha : 0,05<br>**Kesimpulan:**<br>\ Nilai F hitung > F tabel<br>\ Nilai Signifikansi < Alpha 0,05<br>**Jadi, model regresi substruktur 1 layak .** | **1) Kelayakan Model**<br>Nilai F hitung : 49.240<br>Sig. : .000[a]<br>Nilai F tabel : 3.05<br>Alpha : 0,05<br>**Kesimpulan:**<br>\ Nilai F hitung > F tabel<br>\ Nilai Signifikansi < Alpha 0,05<br>**Jadi, model regresi substruktur 1 layak .** |
| **2) Nilai Koefisien Determinasi**<br>R square (k=1) : .603<br>e1 = 1-R square : .397 | **2) Nilai Koefisien Determinasi**<br>Adjusted R square (kk>1) : .379<br>e2 = 1- Adjusted R square : .621 |
| **3) Persamaan Regresi**<br>**Modal Sosial = a + b1 Pemberdayaan**<br>a : 41.088<br>b1 : .603 | **3) Persamaan Regresi**<br>**Kesejahteraan = a + b1 Pemberdayaan + b2 Modal Sosial**<br>a : 40.694<br>b2 : .266<br>b3 : .139 |
| **4) Uji Hipotesis 1**<br>Nilai t hitung : 15.457<br>Sig. : .000<br>Nilai t tabel : 1,97519<br>Alpha : 0,05<br>**Kesimpulan:**<br>\ Nilai t hitung > t tabel<br>\ Nilai Signifikansi < Alpha 0,05<br>**Jadi, Pemberdayaan berpengaruh signifikan terhadap Modal Sosial .** | **4) Uji Hipotesis 2**<br>Nilai t hitung : 3.874<br>Sig. : .000<br>Nilai t tabel : 1,97529<br>Alpha : 0,05<br>**Kesimpulan:**<br>\ Nilai t hitung > t tabel<br>\ Nilai Signifikansi < Alpha 0,05<br>**Jadi, Pemberdayaan berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan** |
| | **5) Uji Hipotesis 3**<br>Nilai t hitung : 2.744<br>Sig. : .007<br>Nilai t tabel : 1,97529<br>Alpha : 0,05<br>**Kesimpulan:**<br>\ Nilai t hitung > t tabel<br>\ Nilai Signifikansi < Alpha 0,05<br>**Jadi, Modal Sosial berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan** |

Pengaruh total dihitung dari jumlah pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung variabel independen terhadap variabel dependen. Perhitungan pengaruh langsung dan tidak langsung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

**Tabel 5.15 Koefisien Pengaruh Langsung, Tidak Langsung dan Pengaruh Total Antar Variabel**

| Variabel | Pengaruh Langsung | Pengaruh Tidak Langsung | Pengaruh Total |
|---|---|---|---|
| Pemberdayaan → Modal Sosial | 1,052 | - | 1,052 |
| Pemberdayaan → Kesejahteraan | 0,266 | 0,146 | 0,412 |
| Modal Sosial → Kesejahteraan | 0,139 | - | 0,139 |

1. **Menghitung Pengaruh Langsung (*Direct Effect* atau DE)**

   a. Pengaruh variabel Pemberdayaan terhadap Modal sosial

   $$PX_2X_1 = \beta_1 = 1{,}052$$

   b. Pengaruh variabel Pemberdayaan terhadap Kesejahteraan

   $$PYX_1 = \beta_2 = 0{,}266$$

   c. Pengaruh variabel Modal Sosial terhadap Kesejahteraan

   $$PYX_2 = \beta_3 = 0{,}139$$

2. **Menghitung Pengaruh Tidak Langsung (*Indirect Effect* atau IE)**

   Pengaruh variabel Pemberdayaan terhadap Kesejahteraan melalui Modal sosial

   $$PX_2X_1 \text{ x } PYX_2 = \beta_1 \text{ x } \beta_3 = 1{,}052 \text{ x } 0{,}139 = 0{,}146$$

3. **Menghitung Pengaruh Total (*Total Effect*)**

   Pengaruh variabel Pemberdayaan terhadap Kesejahteraan melalui Modal sosial

   $$PYX_1 + (PX_2X_1 \text{ x } PYX_2) = \beta_2 + (\beta_1 \text{ x } \beta_3) = 0{,}266 + 0{,}146 = 0{,}412$$

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

**Diagram Jalur untuk Metode *Path Analysis:***

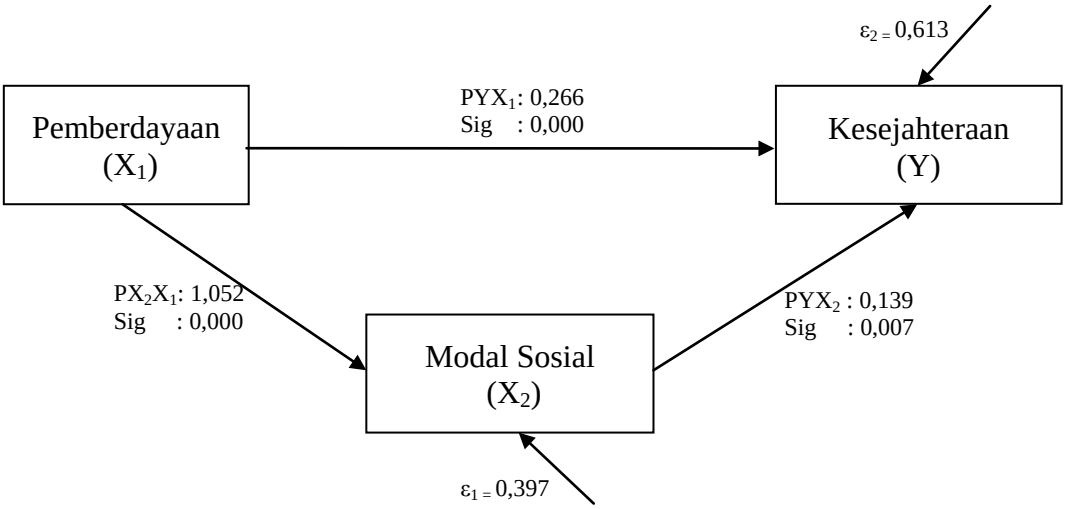


**Gambar 5.7 Hasil *Path Analysis***

Merujuk kepada hasil analisis jalur pengaruh, kemudian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh langsung dengan arah positif dan signifikan dari pemberdayaan terhadap modal sosial sebesar 1,052. Artinya, setiap adanya kenaikan pemberdayaan sebanyak 1 satuan maka Modal Sosial naik sebesar 1,052 satuan.
2. Terdapat pengaruh langsung dengan arah positif dan signifikan dari pemberdayaan terhadap kesejahteraan sebesar 0,266. Artinya, setiap adanya kenaikan pemberdayaan sebanyak 1 satuan maka Kesejahteraan naik sebesar 0,266 satuan.
3. Terdapat pengaruh langsung dengan arah positif dan signifikan dari Modal Sosial terhadap kesejahteraan sebesar 0,139. Artinya, setiap adanya kenaikan Modal Sosial sebanyak 1 satuan maka Kesejahteraan naik sebesar 0,139 satuan.
4. Terdapat pengaruh tidak langsung dari pemberdayaan terhadap kesejahteraan melalui modal sosial sebesar 0,146 yang tergolong cukup kuat, sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif pada pengaruh dari pemberdayaan terhadap kesejahteraan melalui sosial sebesar 0,146.

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

Dengan demikian, pemberdayaan mempunyai pengaruh total terhadap kesejahteraan yang mencapai 0,412.

## F. Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan yang diuraikan pada bab ini berkaitan dengan hasil analisis yang telah dilakukan. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari empat hipotesis yang diajukan seluruh hipotesis tersebut diterima.

### 1. Pengaruh Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir terhadap Modal Sosial

Modal sosial merupakan aset yang paling berharga yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat tertentu dalam suatu wilayah, termasuk masyarakat pesisir yang berdiam di daratan Indragiri Hilir dan Bengkalis. Sumberdaya manusia terbentuk melalui potensi kelompok dengan melakukan hubungannya baik berdasarkan pada jaringan sosial, norma, nilai dan kepercayaan menjadikan sebuah masyarakat memiliki potensi untuk maju dan berkembang. Namun demikian, tentu saja hal tersebut akan terwuiud dengan adanya unsur-unsur motivasi yang dapat mengarahkan mereka pada penerapan kerja kelompok yang lebih baik dan konkrit. Salah satu diantaranya ada!ah hadirnya program-program pemberdayaan masyarakat yang biasanya dikucurkan oleh pemerintah. Harapannya adalah melalui pemberdayaan masyarakat maka modal sosial akan terpakai. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Gold et al dalam Mattana (2006) bahwa secara etimologis modal sosial memiliki pengertian modal yang dimiliki masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat.

Sebagaimana Freire (1992) yang lebih jauh menjelaskan bahwa proses pemberdayaan merupakan metode yang berusaha mengubah persepsi temasuk mengubah motivasi atau dorongan seseorang dalam lingkungan masyarakat, sehingga memungkinkan individu beradaptasi dengan lingkungannya, menumbuhkan kesadaran dan motivasi atau dorongan dalam diri seseorang sebenarnya diperlukan intervensi atau “stimulasi” yang berasal dari luar, seperti rangsangan atau “stimulasi” dana bantuan dari

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

pemerintah, lingkungan yang terkait dengannya dan iain-lain. Hal ini karena motivasi seseorang dapat berkembang tidak lepas dari "kemampuan" seseorang yang ditentukan oleh berbagai macam faktor termasuk budaya yang melekat pada masyarakat tersebut. Budaya secara implisit masuk dalam karakter suatu masyarakat dan dapat berpengaruh pada sifat dan cara bekerja dari masyarakat itu sendiri, sehingga pada gilirannya akan membentuk sebuah modal baik secara fisik maupun nonfisik, kognitif atau afektif yang jika diakumulasi akan mewujudkan suatu modal dalam konteks sosial.

Berdasarkan hasil analisis data, didapati bahwa modal sosial yang tumbuh di dalam kehidupan masyarakat pesisir temyata dipengaruhi oleh program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan pemerintah setempat bagi masyarakat tersebut. Artinya, modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat menjadi semakin baik dengan hadirnya program pemberdayaan yang disebut dengan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang dikucurkan oleh pemerintah pada hampir seluruh wilayah kabupaten/kota di Kabupaten Indragiri Hilir dan Bengkalis.

Item-item program PEMP yang banyak berperan terhadap pembentukan modal sosial menjadi lebih baik tersebut secara berurutan dimulai dari:

a. Kemudahan di dalam mengakses kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) yang disebut usaha Solar Packed Dealer untuk Nelayan (SPDN). Usaha ini didirikan oleh koperasi atau badan usaha untuk menyuplai BBM item nelayan dengan harga subsidi. Adanya SPDN sebagai penyedia BBM yang dibutuhkan nelayan semakin memunculkan semangat kerja dalam kelompok. Para nelayan tidak lagi kesulitan memperoleh BBM untuk melaut, sehingga semua pekeriaan yang seharusnya dilakukan secara bersama-sama dapat dilakukan dengan mudah. Misalnya, melaut dengan waktu yang bersamaan memudahkan saling membantu, mulai dari menyediakan keperluan, bahan-bahan, proses penangkapan ikan, sampai pada mobilisasi hasil tangkapan dari laut ke darat. Kesemua hal tersebut

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

mustahil dilakukan jika BBM yang dibutuhkan tidak tersedia atau sulit didapatkan.

Sebelum adanya SPDN dari program PEMP ini masyarakat memang banyak merasakan dan mengalami kesulitan dalam melaksanakan aktivitas ekonominya sehari-hari. Hal ini sesuai dengan penuturan salah seorang nelayan responden Ismail (Ketua Kelompok Nelayan di Rimba Sekampung, 64 Tahun) sebagai berikut:

*"Sewaktu SPBU belum dibangun secara merata, para nelayan disini merasa kerepotan ketika membutuhkan BBM. Nelayan disini dulunya membeli Solar di desa tetangga. Tapi sekarang, karena sudah ada SPBU yang dekat dengan pesisir pantai, kami tidak usah lagi membeli solar di desa tetangga...."*

Bukti nyata dari perwujudan pemerintah dalam memudahkan nelayan mengakses kebutuhan bahan bakar minyak ditunjukkan dengan gambar berikut:

**Gambar 5.8 . SPDN di Kecamatan Teluk Latak Kab. Bengkalis**

Sumber: Dokumentasi Penelitian, Tahun 2014

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

**Gambar 5.9. SPDN di Kabupaten Tembilahan**

Sumber: Dokumentasi Penelitian, Tahun 2014

b. Modal usaha, yaitu dana yang disediakan oleh pemerintah untuk pengembangan usaha masyarakat pesisir yang dalam hal ini nelayan. sebagaimana SPDN, melalui modal usaha motivasi kerja para nelayan senlakin meningkat terutama dalam hal hubungan kerja antar nelayan. Sikap saling bantu membantu yang memang sudah menjadi karakter budaya orang Indonesia pada umumnya, masyarakat pesisir Indragiri Hilir dan Bengkalis secara khusus memiliki sikap tersebut

Peran pemerintah dalam pembangunan masyarakat untuk kesejahteraan dan kemakmuran memang tidak lepas dari peran serta masyarakat itu sendiri. Sehingga ketika masyarakat lebih diperhatikan dan diberdayakan maka akan mennbangkitkan potensi-potensi yang tersimpan dan akan mengerahkan seluruh potensi tersebut sebab merasa dipercaya atau rnerasa dianggap mampu untuk berperan serta dalam

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

pembangunan, apalagi jika obyek dan sasaran pembangunan adalah masyarakat yang bersangkutan di wilayahnya sendiri.

Modal Usaha seperti media berlayar dan alat tangkap yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat pesisir masih kurang layak karena mereka hanya menggunakan pompong atau perahu kecil (sampan) untuk mencari ikan dengan bantuan jala yang sudah berlubang dan banyak jahitan. Kondisi modal usaha tersebut digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 5.10. Modal Usaha di Kabupaten Tembilahan**

Sumber: Dokumentasi Penelitian, Tahun 2014

**Gambar 5.11 . Modal Usaha di Kabupaten Bengkalis**

Sumber: Dokumentasi Penelitian, Tahun 2014

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

c. Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat pesisir untuk mengelola dana dari program PEMP, yang bertuiuan untuk digulirkan kepada anggota masyarakat secara bergantian agar mereka dapat memperoleh dana untuk modal usaha. Lembaga ini disebut LKM LEPP-M3 Kehadiran LKM sebagai lembaga keuangan di wilayah pesisir adalah bertuluan untuk memudahkan masyarakat nelayan di dalam mengakses modal yang digunakan demi kelancaran usaha secara berkelompok. Akses modal yang relatif sama distribusinya pada setiap kelompok di antara nelayan menciptakan kondisi yang semakin memberikan penguatan satu sama lain sehingga nilai-nilai modal sosial dapat tumbuh menjadi lebih baik. Salah satu kendala utama bagi masyarakat nelayan adalah kurangnya modal kerja. Masalah keuangan tersebut kemudian menggerogoti struktur nilai di dalam masyarakat sehingga menyebabkan pergeseran nilai-nilal potensi sosial masyarakat yang tidak lain adalah terdegradasinya modal sosial yang ditandal dengan menurunnya motivasi kerja secara individual yang pada akhimya berpengaruh pada kehidupan masyarakat secara komuna:. Oleh karena itu,dengan hadirnya LKM dari program PEMP tersebut dapat dikatakan sebagai obat penyembuh dari keruntuhan modal sosial yang terjadi.

d. Yang terakhir, kedai Pesisir yaitu warung atau usaha yang didirikan untuk kebutuhan sembilan bahan pokok (Sembako) atau kebutuhan lainnya sebagai penunjang usaha/ operasi penangkapan ikan disamping untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. LKM LEPP-M3 dan Kedai Pesisir diatas, peranannya di dalam meningkatkan modal sosial nampak relatif dibandingkan dengan peran SPDN dan Modal Usaha seperti dikemukakan pada poin l dan 2 di atas. Hal ini mungkin disebabkan rendahnya tingkat SDM masyarakat pesisir yang ditunjuk atau diamanahkan untuk mengelola LKM dan Kedai Pesisir,sebab kedua jenis usaha tersebut memang sangat rnembutuhkan penanangan dan pengelolaan yang baik dan benar.

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

Beberapa masyarakat pesisir yang mempunyai kemampuan keuangan memilih mendirikan Kedai dan Warung Pesisir yang membantu para nelayan dan keluarganya. Beberapa diantara mereka sering memberi keringanan pada nelayan untuk membayar hutangnya setelah mendapat uang dari hasil tangkapan. Berikut ini adalah contoh Kedai Pesisir yang ada di dua kabupaten:

**Gambar 5.12. Kondisi Kedai Pesisir di Kabupaten Bengkalis**

Sumber: Dokumentasi Penelitian, Tahun 2014

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

**Gambar 5.13. Kondisi Kedai Pesisir di Kabupaten Tembilahan**

Sumber: Dokumentasi Penelitian, Tahun 2014

Walaupun demikian, dari uraian-uraian diatas menggambarkan bahwa secara keseluruhan hadirnya keempat usaha dari program PEMP di tengah-tengah masyarakat pesisir (nelayan) telah memberikan motivasi kerja bagi usaha mereka, yaitu semakin meningkatkan semangat di da:arn bekerja sehingga disini nampak indikasi bahwa telah terjadi peningkatan modal sosial akibat dari terlaksananya program PEMP di Wilayah pesisir Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Bengkalis bahwa semangat kerja yang secara implisit merupakan implikasi dari modal sosial secara umum dapat berkembang dengan hadirnya pemberdayaan masyarakat. Ibarat potensi kerja produktif yang lama tersimpan, bangkit kembali oleh rangsangan-rangsangan (motivasi). Realitasnya pemberdayaan EMP yang dikucurkan oleh pemerintah memiliki daya rangsang atau motivasi yang cukup kuat untuk membangkitkan kembali semangat kerja produktif dari para ne!ayan yang semula memang sudah baik menjadi lebih baik lagi.

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

Meningkatnya keberadaan modalsosial menjadi lebih baik sebagai akibat dari pemberadayaan masyarakat pesisir dari hasil penelitian ini menguatkan konsep pemberdayaan yang dikaji oleh Abu samah, dkk (2009), didalam konteks pembangunan komunitas pada umumnya, dan khususnya membahas tentang penerapan konsep-konsep pemberdayaan di Malaysia. Hasil kajian mereka menunjukkan bahwa pemberdayaan melalui partisipasi adalah sebuah proses berkesinambungan di dalam merespon masalah yang dihadapi bersama, sehingga bisa mendapatkan kendali terhadap kehidupan mereka secara kolektif dalam konteks lingkungan sosial politik.

Sejalan dengan itu, hasil penelitian ini juga semakin menguatkan definisi pemberdayaan yang dijelaskan Usman (1995) sebagai "upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat". Dalam konteks ini, secara implisit pemberdayaan mengandung unsur "partisipasi" yang seharusnya dimunculkan dari dalam diri masyarakat itu sendiri. Hal serupa ditunjukkan Abu Samah, dkk (2009) di atas, di mana pemberdayaan melalui partisipasi merupakan proses yang berkelanjutan terhadap respon masyarakat menghadapi masalah secara bersama-sama.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, jika diamati secara parsial pengaruh pemberdayaan EMP terhadap peningkatan modal sosial yang tumbuh pada masyarakat pesisir berdasarkan indikator-indikator refleksi dari pemberdayaan diketahui bahwa usaha SPDN memiliki pengaruh yang dominan terhadap berkembangnya modal sosial terutama pada dimensi kepercayaan (*trust*) dan jaringan (*network*). Hadirnya usaha SPDN sebagai salah satu item program PEMP di tengah-tengah masyarakat pesisir semakin meningkatkan sikap saling percaya antar sesama kelompok masyarakat pesisir di dalam melakukan pekerjaan penangkapan ikan. Artinya, pemberdayaan EMP yang dilaksanakan melalui usaha SPDN telah mampu mempengaruhi modal sosial menjadilebih baik. Demikian halnya dengan hubungan-hubungan yang tersusun akibat interaksi sosial antar individu kelompok dan di luar kelompok (jaringan) semakin terbentuk secara baik dengan hadirnya usaha SPDN. Hal ini dimungkinkan oleh semakin

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

mudahnya memperoleh bahan bakar minyak (BBM) sebagai salah satu faktor produksi utama setelah kapal dan seperangkat alat penangkapan ikan atau hasil laut lainya. Mudahnya akses BBM tersebut menumbuhkan etos kerja yang lebih baik yang mana sudah menjadi kelaziman (manusiawi) bahwa sikap malas bekerja terkadang muncul sebagai akibat kurangnya keberdayaan ekonomi di dalam proses produksi, apalagi jika hal tersebut bersentuhan langsung dengan faktor produksi penting seperti BBM.

Selanjutnya item penting kedua setetah SPDN dari program PEMP yang telah dilaksanakan di Indragiri Hilir dan Bengkalis adalah modal usaha dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Walaupun umumnya masyarakat nelayan telah memiliki fasilitas penunjang usaha, seperti kapal (motor atau perahu), jaring atau pukat, alat pancing dan sebagainya, namun kenyataannya di dalam melakukan usaha penangkapan kendala yang sangat dirasakan adalah kurangnya modal usaha. Sebagian besar bahkan hampir seluruh nelayan responden di dalam melakukan usaha penangkapan ikan dan hasil laut lainnya memiliki modal yang sangat minim. Hal ini secara langsung ataupun tidak langsung dapat berakibat pada rendahnya hasil penangkapan (produksi). Pengaruh langsungnya adalah berkaitan dengan biaya variabel (*variable cost*) yang dikeluarkan, seperti: pembelian BBM, upah tenaga keria, ransum dan lain-lain. Di samping itu, kapal (motor atau perahu), iaring atau pukat, alat pancing dan perlengkapan alat tangkap lainnya sebagai modal tetap dari pembiayaan awal melakukan usaha disinyalir masih belum memadai jika diukur berdasarkan rasio antara jumlah modal tetap dan besarnya potensi hasil laut yang bisa diperoleh. Ditambah lagi dengan LKM yang selama ini dikelola sendiri tidak berfungsi dengan baik akibat kurangnya bimbingan dan aksesibiltas mendapatkan bantuan pendanaan dari perbankan dan sebagainya. Keadaan seperti ini ternyata dapat berpengaruh pada etos kerja nelayan yang semula baik, sebab juga berkaitan dengan keharusan melaut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga mereka menjadi menurun.

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

Kekuatan modal sosial dalam masyarakat nelayan dapat mengalami degradasi akibat kurangnya keberdayaan ekonomi di dalam melakukan aktivitas melaut. Meskipun gejala itu bukan merupakan sesuatu yang khas di lndonesia namun intinya, modal sosial (*social capital*) yang dimiliki sebagian masyarakat lndonesia tampak semakin menipis (Barliana, 2011). Oleh karena itu, kucuran dana dari pemerintah untuk modal usaha dan pendirian LKM yang disebut LEPP-M3 melalui program PEMP tersebut telah memberikan daya rangsang dan motivasi secara nyata terhadap penguatan kembali dari modal sosial yang sudah ada. Pada kasus di Kabupaten Indragiri Hilir dan Bengkalis, keberadaan kedai pesisir sebagai salah satu item dari program PEMP nampaknya belum besar peranannya dalam keberhasilan penguatan eksistensi modal sosial pada masyarakat pesisir, namun sedikitnya telah memberikan kontribusi walaupun belum secara nyata.

Temuan ini belum banyak didukung oleh hasil kajian empirik yang pernah ada sebab kebanyakan dari riset-riset terdahutu hubungan antara pemberdayaan dan modal sosial hanya dilihat dari sisi pengaruh modal sosial terhadap pemberdayaan, salah satunya seperti penelitian terbaru yang dilakukan Yuliarmi (2011). Pada penelitian tersebut salah satu tujuan penelitiannya adalah untuk menguji pengaruh modal sosial terhadap tingkat pemberdayaan IKM (Industri Kecil Menengah) di Provinsi Bali. Dalam penelitian ini tidak lagi mengkaji hal yang sama. Pentingnya melihat pengaruh dari sisi terbalik, yaitu pemberdayaan terhadap modal sosial adalah berangkat dari fenomena yang terjadi pada masyarakat, khususnya pada masyarakat pesisir yang memiliki budaya kerja yang berperan penting di dalam membentuk modal sosialnya telah mulai mengalami degradasi akibat kurangnya daya rangsang dan unsur-unsur motivasi. sehingga dalam hal ini penting untuk mengamati peranan pemberdayaan sebagai salah satu daya rangsang, pendorong atau motivasi sebagaimana dikemukakan Freire (1992) terhadap pembentukan ataupun peningkatan keberadaann modal sosial dalam suatu masyarakat.

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

Modal sosial memang memiliki peran penting di dalam mensukseskan program pemberdayaan untuk kesejahteraan masyarakat, namun kenyataan menjelaskan bahwa modal sosial itu sendiri akan wujud secara nyata jika ada rangsangan sebagai motivasi baik dari dalam masyarakat pesisir itu sendiri, maupun dari pihak luar misalnya pemerintah. Program pemberdayaan masyarakat yang dikucurkan pemerintah ternyata sangat membantu masyarakat terutama didalam mengatasi masalah-masalah yang berkaitan langsung dengan sistem kerja. Kehadiran program pemberdayaan di tengah-tengah masyarakat telah membangkitkan rasa kebersamaan, saling percaya, dan bantu membantu satu sama lain, apalagi bantuan modal usaha dari program PEMP yang memang ditujukan untuk kelompok bukan individu nelayan, sehingga hal itu tentu akan lebih mendorong kerja sama yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan penuturan salah satu responden informan Isnin (Nelayan, 57 tahun) sebagai berikut:

*"Program ekonomi pesisir sangat bagus bagi kami para nelayan, akan tetapi masih banyak pihak yang belum tahu, bahwa program ini sebenarnya ditujukan untuk kelompok nelayan, bukan nelayan yang bekerja sendiri atau individu. Nantinya diharapkan para nelayan kecil/individu tersebut bergabung ke dalam salah satu kelompok nelayan agar dapat membangun kebersamaan. Kelompok nelayan jugalah yang berfungsi menjembatani pemerintah dengan para nelayan, khususnya dalam program ekonomi warga pesisir...."*

Rasa kebersamaan dan saling percaya serta bantu membantu di antara kelompok masyarakat demikian terpola sehingga lika ada salah satu anggota dari kelompok masyarakat yang kekurangan bahan-bahan dan uang untuk membiayal kegiatan penangkapan, yang lainnya bersedia untuk membantu. Selain itu, Jika salah seorang nelayan atau lebih belum mau kembali ke darat maka hasil tangkapannya bisa dititipkan kepada teman yang kembali lebih awal dengan hanya menyertakan bahan pendingin (es) agar bisa sampai kepada pihak keluarganya atau menunggu nelayan penitip tersebut kembali dari laut dalam keadaan tidak rusak (masih segar).

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

Sebagaimana penuturan informan lainnya Isnin (Nelayan, 57 tahun), berikut:

*"…. kelompok nelayan itu banyak sekali faedahnya. Salah satunya, misalkan ada nelayan yang belum berniat pulang ke daratan, nah, nelayan itu nitip hasil tangkapan ikannya ke temennya yang mau pulang ke daratan. Tapi titip-titipan ikan seperti itu harus ada dasar kepercayaan antar anggota kelompok."*

Hal ini menandakan bahwa modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat pesisir semakin tumbuh dan berkembang secara meluas tidak terbatas pada kelompoknya saja. Jika dikembalikan pada hasil analisis pengaruh pemberdayaan EMP terhadap modal sosial yang secara statistik menunjukkan angka yang signifikan dan iuga dikuatkan oleh penuturan informan di atas, maka dapatlah dipastikan bahwa keberadaan modal sosial yang semakin baik dan meluas dalam masyarakat pesisir tersebut dipengaruhi oleh program pemberdayaan EMP. Aninya, pemberdayaan EMP mampu meningkatkan modal sosial. Hal ini semakin menguatkan penjelasan Freire (1992) tentang proses pemberdayaan sebagai metode yang dapat mengubah persepsi, motivasi atau dorongan seseorang dalam lingkungan masyarakatnya sebagaimana diuraikan di atas, di mana proses pemberdayaan tersebut memungkinkan individu beradaptasi dengan lingkungannya, menumbuhkan kesadaran dan motivasi atau dorongan dalam dirinya.

**Tanggapan Responden**

**A. Modal usaha**

Menurut nelayan di Indragiri Hilir pada Kecamatan Tanah Merah bahwa banyak nelayan yang kekurangan modal . Untuk itu dibutuhkan bantuan khusus modal untuk nelayan. (Rohana dan Syasiah) Selain modal nelayan kekurangan perahu dan alat tangkap ikan (Musa dan Mulyadi).

Di kecamatan lain seperti Kecamatan Reteh dan Kecamatan Sungai Batang Indragiri Hilir para nelayan juga butuh perahu, jaring dan modal untuk menunjang usaha mereka (Desor Aimaja). Hal ini disebabkan

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

peralatan seperti perahu dan lainnya perlu diperbaharui karena perahu mereka sekarang sudah tidak layak digunakan.(Lilia). Untuk memperahui peralatan yang ada, nelayan merasa sulit karena hasil tangkapan tidak pasti terkadang banyak, terkadang sedikit. Sehingga mereka sulit untuk mengembalikan modal usaha mereka.

Usaha yang mereka tempuh selama ini, beberapa nelayan melakukan peminjaman uang kepada kelompok nelayan untuk modal usaha mereka. Namun modal tersebut hanya cukup untuk membeli minyak dan sebagian modal usaha menurut Rahmad. Para nelayan juga pernah mengajukan bantuan kepeda pemerintah sebanyak 10 buah perahu. Tetapi pemerintah hanya menyanggupi 3 buah perahu saja jelas Suardi. Untuk itu nelayan mengharapkan bantuan pemerintah untuk modal usaha mereka jelas Safnah. Diharapkan bantuan perahu dan alat tangkap ikan dari pemerintah..

Keluhan yang sama juga diungkapkan oleh nelayan di Kabupaten Bengkalis. Nelayan di Desa Prapat Tunggal. Pemerintah diharapakan lebih memperhatikan kebutuhan alat penangkapan ikan yang dimiliki nelayan.(Ujianti). Di Desa Rimbas para nelayan mengaharapkan kepada pemerintah untuk membantu mempermudah nelayan dalam mengajukan permohonan pinjaman untuk modal usaha mereka. (Sunar)

**B. Lembaga Keuangan Mikro (LKM)**

Menurut nelayan di Desa Teluk Latak Bengkalis para nelayan mengharapkan perlu adanya Lembaga keuangan Mikro (LKM). Hal yang sama juga diharapkan oleh nelayan di kelurahan Sungai Batang Indragiri Hilir. Para nelayan meminta diaktifkan Lembaga Keuangan Mikro bekerjasama dengan pemerintah dalam menyalurkan bantuan dana. Sehingga nelayan mampu menjalankan usaha mereka dan berdampak positif bagi daerahnya. Para nelayan mengharapkan LKM memudahkan mereka untuk melakukan simpan pinjam di daerah mereka. . Menurut M. Dong di kecamatan Reteh Indragiri Hilir, selama ini belum ada koperasi khusus nelayan. Koperasi yang ada selama ini lebih memfokuskan kepada

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

pedagang. Sehingga nelayan lebih banyak membeli di koperasi pedagang ini. Upaya ini juga mempermudah nelayan dalam berusaha

Di Desa Rimbas Kabupaten Bengkalis, para nelayan mengharapkan lembaga keuangan mikro ini lebih memudahkan pinjaman untuk usaha kecil. Sehingga mereka bisa menperbesar usaha yang ada selama ini.

Disamping itu para nelayan di Desa Meskom Bengkalis mengharapkan Lembaga Keuangan Mikro ini lebih banyak lagi mengulirkan pinjaman untuk pengembangan usaha nelayan.

**2. Pengaruh Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir terhadap Kesejahteraan**

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) kadang-kadang sangat sutit dibedakan dengan penguatan masyarakat serta pembangunan masyarakal (*community development*). Karena prakteknya saling tumpang tindih, saling menggantikan dan mengacu pada suatu pengertian yang serupa. Pendapat dari Cook (1994) menyatakan pembangunan masyarakat merupakan konsep yang berkaitan dengan upaya peningkatan atau pengembangan masyarakat menuju kearah yang positlf. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa secara langsung pengaruh pemberdayaan terhadap kesejahteraan tidak signifikan, bermakna bahwa program PEMP yang dikucurkan belum mampu memberikan kontribusi nyata terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir. Tingkat kesejahteraan yang dicapai selama ini lebih dipengaruhi oleh faktor lain terutama modal sosial.

Sebetulnya pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir telah mampu memberikan dampak positif terhadap perubahan status ekonomi masyarakat pesisir namun hasilnya belum menunjukkan keberhasilan yang nyata. Beberapa hal yang menjadi penyebab dan sekaligus merupakan penjelasan dari realitas program PEMP di dalam perannya mengentaskan kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat pesisir. **Pertama**, berkaitan

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

dengan tingkat kontinuitas program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir yang relatif masih rendah.

**Kedua**, program PEMP yang dilaksanakan melalui 4 (empat) item, yaitu modal usaha, pendirian LKM, kedai pesisir dan penyediaan SPDN tidak diikuti oleh bimbingan dan pelatihan dasar-dasar pengelolaan secara lebih profesional kepada individu-individu atau kelompok dari masyarakat yang ditunjuk untuk mengelola keempat usaha PEMP di tiap-tiap wilayah, sehingga sering terjadi kesalahan administrasi maupun teknis yang kemudian hal tersebut menjadi kendala di dalam mencapai tujuan dari program PEMP itu sendiri. Padahal dengan modal sosial yang dimiliki masyarakat dapat menjadi aset penting dengan hadirnya program PEMP, artinya iika bimbingan dan pelatihan wirausaha dimasukkan sebagai sub-item ke dalam pelaksanaan progam PEMP dan dilaksanakan secara profesional-tidak sekedar pemenuhan realisasi alokasi dana sesuai pos anggaran dan tepas tangan-maka program pemberdayaan masyarakat tersebut akan lebih efektif pengaruhnya terhadap perubahan keadaan ekonomimasyarakat ke arah yang lebih baik.

**Ketiga**, rendahnya SDM masyarakat pesisir yang disinyalir merupakan faktor yang bertanggung jawab terhadap kurang optimalnya pelaksanaan pemberdayaan EMP untuk kesejahteraan masyarakat tersebut dapat dipastikan berdampak pada pengelolaan PEMP yang kurang baik, khususnya pada penanganan kedai pesisir dan LKM sebagai sarana untuk melayani kebutuhan-kebutuhan pokok sehari-hari rumah tangga dan kebutuhan modal untuk membiayai aktivitas melaut para nelayan. Sering kurang tersedianya bahan bahan kebutuhan atau keterlambatan ketersediaan di kedai pesisir menyebabkan nelayan menunda kegiatan mereka. Atau mengurangi jam kerja untuk melaut sebab harus melakukan aktivitas sampingan guna memenuhi kebutuhan rumah tangga yang seharusnya dipenuhi melalui kedai pesisir secara kredit. Sementara itu, mereka juga terpaksa harus meminjam modal untuk biaya melaut ke tempat lain (di luar LKM).

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

Demikian pula pelayanan keuangan pada Lembaga Keuangan Mikro yang sering terlambat atau permintaan mereka yang tidak dikabulkan sepenuhnya, sesuai penuturan responden Nasrudin (42 tahun) sebagai berikut:

*"Masyarakat pesisir khususnya para nelayan mengalami kesulitan dengan modal usaha. Umumnya mereka lebih suka meminjam uang ke Bos atau Tokek Cina, selain itu mereka juga lebih memilih meminjam uang usaha sama Ketua Kelompok karena Ketua Kelompok meminjamkan uang tanpa bunga. Yang penting nelayan yang pinjam harus mengembalikan tepat waktu...."*

Hasil penelitian ini sejaian dengan pernyataan Saefuddin dkk.(2003), bahwa pemerintah telah me!uncurkan berbagai prograrn pemberdayaan ekonomi seperti Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dan program lainnya yang tuiuan utamanya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, namun secaara empiris didapati bahwa pemberdayaan tersebut kurang berhasil. Jebakan kegagalan program terjadi karena implementasi program tidak sesuai dengan konsep yang menjadi referensinya. Artinya sekalipun konsep tersebut baik, aplikasi dilapangan belum tentu menjamin bahwa suatu program pemberdayaan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, sehingga hasilnya belum maksimal. Hal ini diduga bahwa model pemberdayaan yang digunakan belum sesuai dengan obyek yang akan dituju. Sehingga persoalan kemiskinan masih menjadi agenda besar dalam proses pembangunan.

Pendidikan dalam kalangan masyarakat yang diberdayakan masih menjadi faktor penentu dari keberhasilan pemberdayaan. Selain itu karakteristik kelembagaan juga memiliki peran penting untuk memaiukan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan, sebab hal ini berkaitan erat dengan tingkat kelancaran membayar kewajiban (angsuran) dana bergulir, sebagaimana hasil penellian Ridwan (2008) tentang tingkat efektivitas program pemberdayaan (PEMP dan P24K) dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur. Hasil penelitian

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

menunjukkan bahwa faktor/konstruk pendidikan pengaruhnya tidak signifikan terhadap kesejahteraan nelayan (pemanfaatan program PEMP), sementara faktor karakteristik kelembagaan pengaruhnya signifikan terhadap tingkat kelancaran pembayaran angsuran, sehingga Hal ini akan berdampak pada kelambatan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya menghambat kemajuan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal yang sama juga ditunjukkan olah hasil penelitian Fedriansyah (2001) tentang Evaluasi Kinerja PEMP Di Kecamatan Tugu Semarang dan Miraza (2009) mengenai implementasi Program PEMP di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat bahwa Program ini belum mampu menaikkan tngkat kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan kondisi tersebut maka proses pemberdayaan masyarakat seharusnya memperhatkan sistem nilai dan kelembagaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat setempat. Jika tidak, maka tujuan program pemberdayaan itu sendiri tidak dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan. Sistem nilai dan kelembagaan yang ada dalam masyarakat merupakan modal sosial yang harus ditumbuhkembangkan sebab melalui modal sosial tersebut pemberdayaan EMP sebagai salah satu kebijakan pengembangan wilayah peeisir dapat dilaksanakan dengan pencapaian tujuan yang optimal, yaitu mengentaskan kemiskinan dan memajukan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Kondisi di mana program pemberdayaan PEMP belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir tidak terjadi pada seluruh kasus terkait kajian pemberdayaan masyarakat untuk kesejahteraan, sebab pada kasus yang lain seperti di Jawa Tengah dan beberapa wilayah lainnya di Indonesia, program pemberdayaan masyarakat telah berhasil memajukan kesejahteraan masyarakat wilayah tersebut. Hal ini dibuktikan melalui temuan hasil penelitian Widiastuti (2006) dengan judul penelitiannya “Program PEMP di kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Dan total sampel 67 orang ditemukan bahwa Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan kedai pesisir sangat bermanfaat bagi masyarakat walaupun

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

pada Solar Pack Dealer untuk Nelayan (SPDN) tidak terlalu bermanfaat bagi masyarakat pesisir. Namun yang terpenting dari hasil penelitian tersebut adalah dalam pelaksanaan PEMP akses informasi sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa kajian yang sama juga menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir. Hasil studi yang dilakukan oleh Riana Faiza (2004) bahwa dengan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir mampu meningkatkan kesejahteraan yang tinggi bagi nelayan pengolah di Muara Angke. Hamdan (2005), keberhasilan program PEMP ditunjukkan melalui kelembagaan, pembentukan kelompok serta mekanisme perguliran dan penyerapan dana bantuan yang terlaksana dengan baik telah mampu meningkatkan usaha dan pendapatan masyarakat, walaupun untuk keberlanjutan khususnya peguliran dana masih perlu perbaikan karena kendala lambatnya pengembalian pasca program. Kenyataan ini sulit dihindari sebab terkait erat dengan faktor human capital (pendidikan) dan karakteristik kelembagaan yang masih rendah sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, dalam agenda besar pembangunan ke depan, pemerintah sangat perlu memperhatikan beberapa faktor kendala untuk dicarijalan keluarnya.

Selanjutnya hasil studi Meriana (2008) pada keluarga nelayan di Lampung Barat menemukan bahwa melalui pemberian bantuan pinjaman untuk modal usaha telah mampu menaikkan pendapatan masyarakat, selain itu dari keseluruhan responden mengaku bahwa mereka mampu memenuhi kebutuhan pokoknya setelah memanfatkan dana PEMP. Hal ini menandakan bahwa ada efek positif terhadap tingkat kesejahteraan pasca pelaksanaan program PEMP. Pemanfaatan bantuan secara benar dan tepat sasaran sebagai salah satu penentu keberhasilan mereka dalam memperbaiki kondisi kehidupan mereka.

Temuan yang sama oleh Aryansyah (2009) dalam studinya mengemukakan bahwa pelaksanaan program PEMP di Kabupaten

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

Sukabumi melalui dana bantuan telah mampu menaikkan tingkat pendapatan rata rata perbulan 31,19 persen. Kemudian berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, Siagian (2008) dalam studinya menunjukkan bahwa dampak dari pemberdayaan masaarakat melalui program pengembangan kecamatan dengan kegiatan penyediaan sarana sosial, penyediaan sarana ekonomi, penyediaan lapangan kerja telah berhasil dan berdampakpositif terhadap pengentasan kemiskinan.

Belum mampunya program PEMP didalam peran sertanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabupaten Indragiri Hilir dan Bengkalis, menjadi bahan evaluasi bagi pelaksanaan program selanjutnya. Namun hal terpenting yang harus menjadi perhatian pemerintah adalah 2 (dua) hal sebagaimana dijelaskan di atas, yaitu tingkat kontinuitas (ke-istiqomah-an) kehadiran program yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah serta bimbingan atau pelatihan dasar-dasar pengelolaan lembaga pemberdayaan Secara lebih profesional kepada individu atau kelompok dari masyarakat pesisir sebelum atau pada saat program PEMP akan dilaksanakan. Sebagaitambahan juga perlu diperhatikannya sistem nilai dan kelembagaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat setempat.

Keadaan tersebut menandakan bahwa program pemberdayaan EMP belum mampu memberikan kesejahteraan untuk masyarakat, sehingga bisa dipastikan bahwa kesejahteraan yang dicapai masyarakat lebih diperankan oleh faktor modal sosial dan faktor-faktor lain di luar model persamaan kesejahteraan yang diprediksi. Walaupun persepsi masyarakat pesisir memiliki antusias yang tinggi terhadap keberadaan program PEMP di tengah-tengah mereka, namun perlu dipahami luga bahwa umumnya tanggapan masyarakat miskin terhadap program bantuan baik pemeritah ataupun dari non pemerintah untuk mereka selalu dinilai positif.

Penduduk miskin seperti masyarakat pesisir ini, umumnya memiliki keberdayaan ekonomi yang lemah. Hal ini ditandai dengan lemahnya daya beli terhadap kebutuhan-kebutuhan untuk rurnah tangga apalagi untuk

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

usaha. Sehingga kehadiran program pemberdayaan EMP di atas yang sebetulnya diharapkan dapat berperan optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, realitasnya tidak serta merta dapat membantu masyarakat agar bisa keluar dari kemiskinan.Oleh karena itu implementasi program PEMP Sebaiknya tidak hanya menerapkan sistem positif yang memperhalikan kemampuan dan profesionalitas masyarakat yang diberdayakan semata sehingga mengenyampingkan faktor modal Sosial yang mereka miliki.

Selain tingkat kontinuitas program PEMP yang relatif rnasih rendah yang merupakan implikasi bahwa porsi anggaran pemerintah untuk pembiayaan PEMP masih relatif kecil dan ditambah dengan rendahnya SDM masyarakatnya maka ketidakberdayaan ekonomi masyarakat pesisir juga menjadi kendala dan merupakan masalah krusial yang dihadapi pemedntah di dalam mewujudkan tujuan dan program pemberdayaan untuk kesejahteraan. Kompleksitas perrnasalahan di atas sebagai akibat keterbatasan sumber daya dari kedua belah pihak yaitu pemerintah dan masyarakat, harus dicarikan jalan keluarnya yaitu melalui kebijakan yang lebih partisipatif dengan menitikberatkan pada sistem nilai dan kelembagaan yang bertaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, dengan pertimbangan modal sosial yang dimiliki masyarakat yang juga cenderung semakin berkembang akibat intervensi pemerintah melalui pemberdayaan, maka sekali lagi ditekankan bahwa intervensi pemerintah yang lebih besar khususnya untuk pengalokasian dana pembangunan dalam bidang pemberdayaan masih sangat diperlukan agar masyarakat dapat meningkatkan pendapatannya sehingga bisa mencapai tingkat kesejahteraan yang sesuai harapan bersama.

Sebetulnya pemberdayaan EMP yang dilaksanakan selama ini telah banyak meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat pesisir, secara statistik telah menunjukkan angka yang signifikan. Hal ini terungkap dari penuturan responden informan Isnin (Nelayan, 57 tahun) berikut:

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

*".... Dari program ekonomi pesisir, masyarakat bisa memanfaatkan bantuan pemerintah untuk penghidupan yang lebih baik. Oleh karenanya, masyarakat merasa sangat terbantu sekali dengan adanya program itu. Akan tetapi, program itu berjalan kurang efektif dan kurang merata...."*

Berdasarkan uraian-uraian dan hasil wawancara di atas, terutama penjelasan sub-sub bab sebelumnya dari hasil penelitian ini, maka di balik kurang berhasilnya pemberdayaan EMP untuk kesejahteraan masyarakat pesisir, ada dua hal penting yangpatut dipertimbangkan terkait dengan masih perlunya pemberdayaan EMP tersebut dilaksanakan, yaitu:

a. modal sosial cenderung semakin tumbuh dengan lebih baik jika ada pemberdayaan EMP di satu pihak, dan modal sosial yang semakin kuat tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pihak lain' Artinya, ada harapan bahwa pemberdayaan EMP untuk tujuan kesejahteraan dapat dicapai melalui mediasi kekuatan modal sosial. Hal ini akan dijelaskan secara detail pada sub bab selanjutnya.
b. Walaupun belum optimal peran dari pemberdayaan EMP untuk kesejahteraan, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa pemberdayaan EMP sangat membantu masyarakat pesisir untuk keluar dari kesulitan. Kesulitan ekonomi, sebagaimana penuturan responden informan di atas.

**Tanggapan responden**

**A. Pendidikan**

Para nelayan di Desa Meskom Bengkalis mengharapkan pemerintah lebih memperhatikan fasilitas pendidikan di daerah mereka. Menurut Umar Mea, pemerintah lebih meningkat memperhatikan secara serius dalam bidang pendidikan. Pembagunan fasilitas dan kualitas pendidikan lebih ditingkat lagi menurut Sair.

Menurut pendapat Hj. Misyem di Desa Rimbas pemerintah agar lebih memperhatikan kualitas pendidikan di daerah mereka. Karena dari pendidikanlah tercapai kesejahteraan di daerah mereka. Untuk itu jelas Malina dibutuhkan bantuan dalam saran dan prasaran pendidikan oleh pemerintah.

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

Bantuan pemerintah dalam penetapankan harga ikan juga diharapkan nelayan, sehingga meningkatkan pendapatan nelayan dan mereka dapat menyekolahkan anak-anak mereka ke tingkat lebih tinggi

**B. Kondisi fasilitas Penunjang usaha dan kebutuhan rumah tangga**

Banyak nelayan yang melakukan usaha menangkap ikan dengan mengunakan perahu dan peralatan penangkapan ikan yang di pinjam dari orang lain. Di Kecamatan Sungai Batang Indragiri Hilir menurut Acok, di butuhkan perahu sendiri untuk nelayan karena masih ada nelayan yang meminjam perahu dan alat tangkap ikan kepada nelayan lain. Hal senada juga diungkapakan oleh nelayan di Kecamatan Tanah Merah, nelayan untuk mencari ikan ada yang meminjam dan menyewa perahu, perahu yang dimiliki sudah tua dan bocor. Menurut Norma Ayu, selain perahu nelayan membutuhkan alat-alat alat nelayan seperti jaring (jala). Hal ini dikarenakan peralatan mereka banyak yang sudah rusak. Sedangkan untuk mmbeli peralatan baru,mereka kesulitan keuangan.

**3. Pengaruh Modal Sosial terhadap Kesejahteraan**

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian terdahulu bahwa modal sosial merupakan salah satu sumberdaya masyarakat yang terbentuk melalui hubungan antar individu dalam kelompok masyarakat yang bersangkutan. Hubungan tersebut dituangkan dalam wujud kerja sama antar kelompok masyarakat untuk tujuan penguatan potensi sumberdaya dengan memperhatikan dimensi-dimensi dari modal sosial itu sendiri. Gambar berikut adalah merupakan salah satu wujud kerja sama dan saling bantu membantu antar kelompok serta sukarela.

Berdasarkan hasil analisis data, ditemukan bahwa modal sosial berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir. Artinya, modal sosial yang semakin baik turut memberikan kontribusiyang nyata terhadap peningkatan kesejahteraan. Melalui kecenderungan saling tukar kebaikan (Reciprocity) antar individu, kepatuhan terhadap aturan-aturan yang telah disepakati bersama (Norms), hubungan-hubungan yang tersusun akibat interaksi sosial (Netwotk), kejujuran yang dimiliki (trust), dan tingkat

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

partisipasi anggota dalam kelompok (Group), masyarakat pesisir telah mampu menghantarkan kelompoknya pada kondisi ekonomi yang lebih baik. Berikut penjelasan dimensi-dimensi modal sosial berdasarkan besaran nilai (masing-masing loading faktor dan T-Statistik) yang membentuk variabel laten modal sosial di dalam mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir di Indragiri Hilir dan Bengkalis, sebagai berikut:

**a. Jaringan (Network)**

Kesejahteraan masyarakat pesisir terutama diperoleh melalui kekuatan jaringan, yaitu hubungan-hubungan yang tersusun akibat interaksi sosial antar individu baik di dalam maupun di luar kelompok masyarakat pesisir. Jaringan antara kelompok masyarakat pesisir dan jaringan di luar kelompok masyarakat pesisr sebagai wujud interaksi sosial mereka inlah yang kemudian membuka peluang-peluang kerjasama yang produktif sehingga proses penangkapan ikan lebih efektif dan hasilnya menjadi lebih meningkat. Peningkatan hasil penangkapan akan meningkatkan pendapatan sehingga kesejahteraan menjadi lebih baik.

Adapun item jaringan yang tersusun antara lain membina hubungan baik dengan pihak pengurus atau pengelola usaha dari pemberdayaan masyarakat yang meliputi kedai pesisir, SPDN(Pertamina), dan LKM LEPP-M3.

Selain itu juga membina hubungan baik dengan pihak pemerintah setempati tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat diluar komunitas masyarakat pesisir, sehingga jika ada permasalahan yang dampaknya meluas ke masyarakat maka dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat atau kepentingan bersama.

Demi kelancaran usaha LKM maka para anggota kelompok juga menawarkan kepada orang lain untuk menjadi nasabah di LKM dan berbelanja di kedai pesisir. Sedangkan untuk kegiatan perawatan atau pemeliharaan ikan agar tetap segar sampai ke pasar dan juga kegiatan pemasarannya maka para anggota kelompok membina hubungan baik

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

dengan pengusaha yang memiliki alat pendingin untuk kebutuhan suplai es atau dengan pihak pemasaran yang dalam hal ini pengusaha pengumpul yang akan menjualnya di pasar. Oleh karena itu, pasar yang disentuh oleh kebanyakan nelayan adalah pasar input berupa ikan segar dan ikan yang telah diasapi.

**Gambar 5.10 Salah satu contoh jaringan masyarakat nelayan**

Sumber: Dokumentasi, 2014

**b. Kepercayaan (Trust)**

Kesejahteraan yang diperoleh juga diperankan oleh tingginya tingkat kepercayaan masyarakat baik antar individu rnaupun antar komunitas, yang tidak lain sebagai akibat perilaku jujur yang dimiliki sebagian besar individu masyarakat pesisir, sehingga memunculkan sikap saling percaya, konsisten dalam berperilaku, tanggung jawab, saling menghargai dan menghormati serta ketulusan. Melalui sikap saling percaya masyarakat pesisir dapat melakukan aktivitas sosial dan ekonominya dengan rasa tanggungiawab bersama guna mencapai suatu tujuan bersama yaitu kesejahteraan sosial.

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

Pinjam meminiam dalam bentuk uang tanpa bunga adalah hal yang biasa terjadi dalam kelompok masyarakat pesisir. Sikap saling percaya satu sama lain serta komitmen yang tinggi untuk mengembalikan pinjaman tepat waktu menjadikan hubungan antar masyarakat senantiasa terjaga. Hubungan yang baik inilah yang kemudian menjadi salah satu modal sosial bagi masyarakat pesisir mencapai kesejahteraannya.

**Gambar 5.15 Bentuk kerjasamaantar nelayan**

Sumber: Dokumentasi, 2014

**c. Timbal Balik (Reciprocity)**

Kecenderungan saling tukar kebaikan antar individu dalam kelompok masyarakat pesisir (Reciprocity) juga merupakan dimensi yang memberikan penguatan terhadap modat sosial di dalam perannya meningkatkan kesejahteraan bersama.

Melalui hubungan timbal balik ini para nelayan melangsungkan aktivitas ekonominya dengan saling bantu membantu, Satu sama lain saling meminjam alat dan peralatan (perahu, mesin, jaring dan

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

sebagainya), saling menjaga keamanan terhadap peralatan penangkapan ikan (karamba, sero, dan lain-lain), saling memfasilitasi di dalam memecahkan masalah-masalah dalam kegiatan usaha. Kesemuannya itu tidak hanya diwujudkan di antara anggota kelompok dalam kegiatan usaha, tetapi juga antar masyarakat secara umum dalam kehidupan sehari-hari.

**Gambar 5.16 Beberapa alat nelayan yang digunakan sesama anggota kelompok nelayan**

Sumber: Dokumentasi, 2014

**d. Kelompok (*Group*)**

Tingkat partisipasi anggota dalam kelompok seperti banyaknya jumlah anggota, frekuensi partisipasi di dalam pertemuan dan pengambilan keputusan, kontribusi sumber pendanaan dan keikutsertaan di dalam pengumpulan dana kelompok sangat menentukan kelancaran kegiatan ekonomiyang dilakukan baik secara individu maupun bersama-sama. Jika ada salah seorang atau beberapa anggota yang kekurangan dana atau modal untuk melaut maka anggota

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

lainnya yang memiliki dana akan berusaha untuk memberikan bantuan pinjaman, baik sesama anggota maupun dari luar anggota masyarakat pesisir, misalnya dari pihak pengusaha atau pengumpul. Hal ini dilakukan jika dana yang tersedia di LKMLEPP-M3 tidak mencukupi untuk mendanai kegiatan usaha.

Sebetulnya didalam kelompok, partisipasi anggota tidak hanya yang berkaitan dengan kegiatan usaha, tetapi juga di luar bidang pengembangan usaha, misalnya bidang pendidikan dan kesehatan. Membantu memberikan pinjaman atau secara sukarela kepada anggota kelompok yang sedang menyekolahkan anaknya atau yang anggota keluarganya sedang mengalami sakit. Kesemuanya itu dibicarakan dan diputuskan di dalam setiap pertemuan kelompok.

**Gambar 5.17 Salah satu bentuk kebersamaan masyarakat nelayan**

Sumber: Dokumentasi, 2014

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

**e. Norma (Norms)**

Kepatuhan terhadap aturan-aturan (Norms) juga merupakan indikator modal sosial yang turut menjadi penyebab meningkatnya kesejahteraan masyarakat pesisir didaratan Indragiri Hilir dan Bengkalis.

Norma yang berlaku dalam masyarakat pesisir adalah yang berkaitan Dengan pengelolaan modal usaha, kedai pesisir, LKM dan SPDN yang berlandaskan pada budaya masyarakat melayu pesisir sebagai suku dominan di wilayah Riau pesisir. Kebanyakan dari aturan tersebut tidak tertulis namun secara umum telah dipahami oleh setiap anggota komunitas. Sedangkan aturan atau norma yang berlaku berkaitan dengan usaha pemberdayaan diatas, bisa tertulis dan juga tidak tertulis. sehinggga di sini nampak ada keselarasan antara aturan-aturan dari keduanya, yang selebihnya tinggal ditaati atau tidak. Aturan-aturan yang berlaku baik dalam usaha pemberdayaan maupun adat atau budaya senantiasa dipatuhi oleh anggota kelompok masyarakat pesisir, misalnya harus menyisihkan dana sosial untuk kepentingan bersama (masyarakat pesisir), selalu mengikuti pertemuan kelompok yang telah disepakati bersama agar setiap keputusan yang diambil dapat disaksikan dan disetujui secara bersama-sama terutama yang berkaitan dengan cara mengembangkan usaha yang tidak merusak ekosistem laut, seperti tidak menggunakan bahan peledak dan racun dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan dan seterusnya.

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

**Gambar 5.18 Pelarangan Penggunaan Alat Tangkap yang merusak ekosistem laut**

Sumber: Dokumentasi, 2014

Peran nyata modal sosial didalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dalam temuan penelitian ini, jika ditarik ke level makro memiliki relevansi dengan penjelasan Collier dalam Lawang (2004) bahwa modal sosial seharusnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan harus mampu membuat pertumbuhan yang terjadi dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan sosial, tidak saja pihak yang masuk dalam lingkaran persahabatan (kelompok) secara khusus, tetapi tennasuk masyarakat secara luas. Artinya bahwa peran modal sosial terhadap kesejahteraan adalah terlebih dahulu melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, karena terkait dengan modal yang dimiliki yang bersifat sosial maka kesejahteraan yang hendak dicapaipun adalah kesejahteraan sosial bukan individu. Pertumbuhan ekonomi yang maju di dalam wilayah kelompok masyarakat pesisir diharapkan dapat berdampak pada kesejahteraan sosial masyarakat tersebut.

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

Sebetulnya kesejahteraan sosial yang dicapai masyarakat pesisir tidak secara parsial dipengaruhi oleh kekuatan modal sosial semata. Keterlibatan pemberdayaan masyarakat sebagai penguat keberadaan modal sosial dalam masyarakat pesisir peranannya turut rnernberikan sumbangan di dalam meningkatkan kesejahteraan yang dicapai masyarakat pesisir, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat mendorong modal sosial menjadi lebih baik dan modal sosial yang semakin baik mendorong peningkatan kesejahteraan. Hal ini nampak jelas bahwa moda:sosial selain secara langsung dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan sosial masyarakat pesisir, juga ternyata dapat menjadi full mediation bagi hubungan antara pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan. Hubungan ini akan dibahas lebih detail pada sub bab selanjutnya tentang pengaruh pemberdayaan EMP terhadap kesejahteraan melalui modal sosial. Pada sub bab ini khusus membahas pengaruh modalsosial terhadap kesejahteraani sehingga berdasarkan hasil analisis dan pembahasannya di atas dapatlah disirnpulkan bahwa pencapaian kesejahteraan masyarakat pesisir adalah diperankan oleh keberadaan modal sosial yang dimiliki masyarakatnya, yaitu kuatnya keterdukungan unsur-unsur pokok dari modal sosial itu sendin yang meliputi timbal balik, norma, jaringan, kepercayaan, dan kelompok.

Hasil studi ini sejalan dengan beberapa riset yang dilakukan peneliti asing (luar negeri), antara lain temuan Narayan dan Pritchett (1999) yang melakukan penelitian tentang "*cent and sociability: Houshold Income and Social Capital in Tanzania*", menemukan bahwa meningkatnya satu persen standar deviasi dari indeks modal sosial akan meningkatkan 20 persen pengeluaran rumah tangga per kapita. Dengan demikian modal sosial adalah sangat penting untuk menganalisa pendapatan dan kemiskinan, yang jika diabaikan dapat menghasilkan "*missing a large part of the poverty puzzle*". Selain itu, hasil penelitian mereka menunjukkan bagaimana modal sosial mampu menghasilkan *spillover effect* (efek lebih lanjut) dan membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

Demikian halnya dengan penelitian Grootaet (1999) yang membahas mengenai hubungan antara modal sosial, kesejahteraan keluarga miskin di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ada tiga dimensi yang paling berpengaruh terhadap tingkat pengeluaran keluarga yaitu indeks kepadatan keanggotaan dalam organisasi/ kelompok, heterogenitas internal dan tingkat keaktifan dalam pengambilan keputusan. Hasil pendugaan model regresi juga menginformasikan bahwa tingginya modal sosial disamping berpengaruh positif terhadap tingkat pengeluaran keluarga, juga berpengaruh positif terhadap asset, akses kedit, saving dan kemungkinan meningkatkan pendidikan anak.

Narayan and Cassidy (2001) dalam penelitiannya yang berjudul "*A Dimensional Approach to Measuring Social Capital: Development and vatidation of a social capital inventory*" di Republik Ghana dan Uganda pada musim panas tahunl 1995. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dari data yang didapatkan dari 2 negara yang berbeda kondisinya tersebut ternyata modal sosial memiliki peran penting bagi kesejahteraan masyarakat. Optimisme kepuasan terhadap hidup, persepsi tentang institusi pemerintah dan keterlibatan politik semuanya sangat dipengaruhi oleh dimensi dasar dari modal sosial, kepercayaan, ketelibatan dalam komunitas, keterlibatan sosial, kerja sukarela dan bisa memberikan pengaruh baik positif maupun negatif terhadap sikap dan perilaku. Perbedaan tingkat modal sosial di Ghana dan Uganda bisa menjelaskan mengapa terjadi perbedaan level ekonomi antara masyarakat di kedua negara tersebut. Namun untuk melakukan verifikasi secara empiris terhadap dugaan ini masih diperlukan penelitian lebih lanjut.

Selanjutnya Van Ha, dkk (2004) meneliti tentang kontribusi modal sosial dengan output rumah tangga di Vietnam. Hasil dari penelitian mereka menunjukkan bahwa (1) Modal sosial memiliki kontribusi yang besar dan positif bagi pendapatan rumah tangga: (2) Kontribusi positif dari modal sosial bagi pendapatan rumah tangga kelompok miskin di desa pengrajin daur ulang kertas adalah lebih besar daripada bagi rumah tangga

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

kelompok kaya di desa yang sama,(3)jumlah keanggotaan dalam asosiasi pengrajin daur ulang kertas tidak memiliki dampak terhadap pendapatan rumah tangga.

Sedangkan untuk riset-riset lokal yang dilakukan peneliti-peneliti dalam negeri, hasil peneiltian ini juga seialan dengan beberapa dari hasil riset tersebut, antara lain temuan Kamami (2010) tentang pengaruh modal sosial terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Minangkabau, yang menemukan bahwa modal sosial dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kemampuan masyarakat tersebut, tidak sekedar jumlah tetapi kehidupan masyarakat yang lebih berani. Jadi peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa dicapai jika ada kemauan dan keinginan dari masyarakat tersebut untuk meningkatkan modal sosialnya. Dalam level mikro, hal serupa dikemukakan Alfiasari (2008) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Modal Sosial dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin di Kelurahan Kerdung Jaya, Kec. Tanah Sereal Kota Bogor bahwa modal Sosial (kepercayaan, jaringan, norma sosial mempunyai hubungan Signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga. Manzilati (2009) dalam peneJannya yang berjudul Tata Kelola Kelembagaan (Institusional Arrangement) Kontrak Usaha Tani Dalam Kerangka Persoalan Keagenan (Principal Agent Problem) dan implikasinya Terhadap Kebelanjutan Usaha Tani. Hasil penelitian Manzilati (2009) yang paling relevan dengan temuan penelitian ini adalah bahwa kepercayaan sebagai unsur dalam modal Sosial dalam kelompok tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga keberlanjutan usaha tani.

Sedangkan level makronya, Bastelaer (2002) menyatakan bahwa modal sosial berpengaruh terhadap pembangunan. Dari hasil penelitian ini dengan sejumlah dukungannya terhadap penelitian-penelitian terdahulu, semakin memberikan penguatan konsep untuk modal sosial sebagai faktor yang patut menerangkan kemajuan dalam pembangunan kesejahteraan suautu masyarakat, sehingga dalam hal ini Bank Dunia (World Bank,

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

2001), juga menggunakan konsep modal sosial untuk menerangkan berbagai kemajuan dalam pengentasan kemiskinan.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa terlepas dari cakupannya yang terdiri atas level mikro dan makro, modal sosial dalam mempengaruhi pembangunan merupakan hasil interaksijenis modal sosial, yaitu interaksi modal sosial struktural dan kognitif. Modal sosial struktural memfasilitasi pembagian informasi, tindakan bersama dan pengambilan keputusan bersama melalui posisi/ peran yang telah mapan, jaringan sosial dan struktur sosial lainnya yang ditambah dengan aturan-aturan, prosedur dan tata cara (Andromeda, 2008). Selanjutnya, konsekwensi jenis interaksi modal sosial ini relatif lebih obyektif dan dapat diobservasi. Adapun modal sosial kognitif menunjuk pada norma-norma yang dibagikan, nilai-nilai, kepercayaan, perilaku dan perasaan dan sikap, dan kepercayaan agama, maka interaksi modal sosial kognitif ini lebih subyektif dan konsepnya adalah *itangible* (tidak kelihatan) (Andromeda, 2008). Uraian-uraian di atas menerangkan bahwa, kesejahteraan masyarakat pesisir sebagai salah satu ukuran pembangunan di bidang pengentasan kemiskinan, keberhasilannya lebih dominan diperankan oleh kekuatan dimensi-dimensi modal sosial tersebut, baik dari sisi struktural yang lebih bersifat obyektif maupun sisi kognitif yang bersifat subyektif.

Terkait dengan temuan hasil penelitian ini, maka berdasarkan hasil wawancara terbuka dengan beberapa responden informan terungkap bahwa keberhasilan masyarakat pesisir di dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan yang ditandai dengan jumlah hasil tangkapan dan akses penjualannya adalah akibat dari hubungan yang terjalin dengan baik antar pihak kelompok masyarakat nelayan secara internal dan dengan pihak perusahaan (pembeli/ konsumen).

Sehingga dengan jaringan atau hubungan kerja yang baik tersebut semakin mengefisienkan dan mengefektifkan proses kerja sampai pada hasil akhir yaitu penjualan. Sebagaimana penuturan responden informan H. Ismail (Ketua Kelompok Nelayan, 64 Tahun), berikut:

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

*"Nelayan itu harus pandai membangun jaringan. Jadi hal semacam pemasaran ikan dan barang tangkapan lainnya tidak terlalu lama sampai ke tangan konsumen...."*

Penuturan informan di atas, memberikan gambaran bahwa berkat kerja sama dengan pihak-pihak lain dapat membantu proses penjemputan dan penjualan hasil tangkapan secara lebih efisien dan efektif, sehingga hasil penjualan bisa lebih dioptimalkan. Efisiensi dan efektivitas kerja biasanya diukur berdasarkan optimalisasi penggunaan input (sumber daya). Penggunaan sumber daya yang optimal akan menghasilkan output yang optimal sebab biaya transaksi dan biaya kendali dapat ditekan seminimal mungkin. Hal ini dijelaskan oleh Mangkuprawira (2010) tentang hubungan modal sosial positif dengan kesejahteraan masyarakat. Modal sosial yang baik memberikan efek positif pada cara keda yang lebih baik dan profesional, salah satunya menjalin hubungan kerja yang baik secara internal dan juga eksternal sebagaimana disebutkan di atas. Jika output yang dihasilkan lebih besar maka hal itu dapat meningkatkan penghasilan para nelayan sehingga kesejahteraan masyarakat pesisir secara umum juga bisa meningkat.

Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat pesisir terbagi atas nelayan penuh, nelayan sambilan utama, dan nelayan sambilan tambahan. Selain itu terdapat pula masyarakat pesisir yang bukan nelayan tapi bekerja sebagai pengecer hasil tangkapan untuk dijual ke pasar atau kepada penjual ikan keliling. Hal ini lazim juga dilakukan oleh nelayan sambilan tambahan yang memang lebih banyak waktu berada di darat dari pada di laut. Keberadaan para pengecer dan nelayan sambilan tambahan ini sangat menguntungkan para nelayan penuh dan nelayan sambilan utama di dalam memasarkan hasil tangkapannya, sehingga jika para pengecer kekurangan modal (uang) untuk membeli ikan hasil tangkapan nelayan, maka mercka tetap boleh menerima ikan hasil tangkapan untuk dijual ke pasar dengan pembayaran di belakang. Hal ini nampak bahwa diantara masyarakat pesisir nelayan dan bukan nelayan atau setengah nelayan (pengecer)

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

memiliki rasa saling percaya dan kebersamaan sehingga kerja sama yang baik mudah dilakukan, sebagaimana penuturan informan Solihin (Penjual Ikan, 64 Tahun), berikut:

*"Kami, penjual ikan memiliki rasa saling percaya dalam bekerja sama dengan para nelayan. Beberapa dari mereka ada juga yang saya bayar ikannya belakangan karena dananya tidak cukup jika saya membayar di depan...."*

Bisa dibayangkan yang akan terjadi pada ikan hasil tangkapan jika rasa kebersamaan dan saling percaya tidak tumbuh dalam masyarakat. Di satu sisi produksi ikan mentah merupakan barang cepat rusak dan bisa membutuhkan biaya tambahan yang tidak sedikit, seperti pengasapan jika tidak segera didistribusi ke pasar atau dijual, dan di sisi lain, tidak sedikit di antara para pengecer yang memiliki kesediaan dana yang cukup untuk membayar di muka ikan hasil tangkapan nelayan,sehingga mau tidak mau untuk menghindari resiko kerusakan (busuk) dan biaya pengasapan maka para nelayan harus menyerahkannya kepada para pengecer dengan pembayaran di belakang, walaupun sistem pengasapan tetap dilakukan jika hasil tangkapan melimpah, dimana pada saat-saat seperti itu terjadi excess supply, yaitu penawaran ikan lebih tinggi daripada perrnintaannya di pasar, sehingga satu-satunya cara untuk mengatasi hal tersebut adalah mengawetkan ikan tersebut dengan cara pengasapan.

Sistem kekerabatan dalam pola kerja sama seperti ini sudah berangsur lama dan merupakan salah satu modal sosial yang terbukti telah memberikan solusi dari masalah-masalah yang dihadapi sehingga bisa menghantarkan masyarakat pesisir menjadi lebih sejahtera. Dari uraian-uraian di atas, nampak jelas bahwa penelusuran secara kualitatif dilapangan memilki relevansi dengan hasil yang diperoleh secara kuantitatif, sehingga dalam hal ini dapatlah disimpulkan bahwa modal sosial memang benar-benar memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan, yakni mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Indragiri Hilir dan Bengkalis.

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

Tanggapan Responden

Pengaruh kelompok nelayan juga besar dalam kesejahteraan mereka. Menurut Rico nelayan di Kecamatan Tanah Merah kelompok nelayan sangan mementu mereka dalam berusaha. Ini terbukti para nelayan sering meminjam modal usaha kepada ketua kelompok mereka dalam melaksanakn usahanya. Sedangkan pembayaran pinjaman dilakukan setelah dipotong dari penangkapan ikan yang telah dilakuan mereka. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ruslan nelayan Kecamatan Tanah Merah. Menurutnya kebanyakan nelayan untuk mencukupi kebutuhan saat tangkapan sedikit mereka meminjam kepada bos nelayan. Menurut nelayan Kecamatan Sungai Batang Indaragiri Hilir. Dana pinjaman yang dilakukan selama ini dari dana kelompok atau dana sendiri.

**4. Pengaruh Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir terhadap Kesejahteraan Melalui Modal Sosial**

Walaupun pemberdayaan EMP secara langsung belum mampu memerankan keikutsertaannya dalam upaya peningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabupaten Indragiri Hilir dan Bengkalis, namun realitas menunjukkan bahwa pengaruh pemberdayaan EMP terhadap kesejahteraan secara tidak langsung yaitu melalui peran modal sosial adalah cukup kuat. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien jalur atau pengaruh tidak langsung (PTL) sebesar 0,146. Angka tersebut secara statistik bermakna bahwa PTL dari program PEMP telah mampu memberikan kontribusi positif yang cukup nyata terhadap peningkatan kesejahteraan melalui penguatan modal sosial, serta mampu menaikan efek total dari tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi sebesar 41,2 persen (0,412). Hal ini memberi makna bahwa melalui modal sosial yang dimiliki masyarakat pesisir, maka program pemberdayaan EMP bisa berhasil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut.

Hasil Penelitian ini memberikan implikasi bahwa modal sosial yang tumbuh dalam masyarakat pesisir memiliki peranan yang sangat penting di

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

dalam memediasi program pemberdayaan EMP untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut. Jadi keberhasilan program pemberdayaan EMP didalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh peran modal sosial. Artinya, bahwa tanpa modal sosial yang kuat program pemberdayaan EMP tidak mampu berperan nyata terhadap kemajuan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabupaten Indragiri Hilir dan Bengkalis. Mula-mula modal sosial mendapatkan daya rangsang dan motivasi dari program pemberdayaan EMP disatu sisi, sehingga dengan adanya daya rangsang tersebut modal sosial menjadi semakin baik. Kemudian dengan modal sosial yang semakin baik, kesejahteraan masyarakat dapat lebih meningkat disisi lain.

Fukuyama (2000) menunjukkan hasil-hasil studi di berbagai negara bahwa modal sosial yang kuatakan merangsang pertumbuhan berbagai sektor ekonomi karena adanya tingkat rasa percaya yang tinggi dan kerekatan hubungan dalam jaringan yang lebih luas tumbuh antar sesama pelaku ekonomi. Hasil-hasil studi tersebut tidak lain adalah menjelaskan tentang peranan modal sosial di dalam menumbuhkan sektor ekonomi yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan.

Sebetulnya terdapat hubungan kausalitas antara pemberdayaan dan modal sosial, di mana keduanya saling berperan terhadap satu sama lain dan kemungkinan interaksi hubungan inilah yang kemudian berdampak positif pada peningkatan status kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hanyasaja, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa penelitian ini hanya melihat peranan pemberdayaan terhadap modal sosial. Namun demikian, dari peran satu arah tersebut telah cukup mampu memberikan dampak positif yang nyata terhadap peningkatan kesejahteraan.

Peran mediasi modal sosial pada pengaruh pemberdayaan EMP terhadap kesejahteraan dalam hasil penelitian ini, belum banyak didukung oleh riset-riset terdahulu. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya penelitian tentang pemberdayaan dan modal sosial khususnya di lndonesia yang menyoroti peran pemberdayaan terhadap modal sosial. Penelitian

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

terbaru yang dilakukan Yuliarmi (2011), justru menyoroti hal yang terbalik, yaitu peran modal sosial terhadap pemberdayaan IKM dan peran mediasi pemberdayaan IKM pada pengaruh modal sosial terhadap kesejahteraan pengrajin di Provinsi Bali. Oleh karena itu, hasil penelitian tentang peran mediasi modal sosial pada pengaruh pemberdayaan EMP terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir merupakan temuan penting dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan dari beberapa responden informan, ditemukan bahwa hubungan kerja sama yang baik dan tingginya rasa saling percaya diantara nelayan telah memberikan kontribusi sosial dan ekonomi secara luas dalam masyarakat pesisir. Keduanya, yaitu hubungan kerja sama yang baik dan rasa saling percaya merupakan modal sosial, yang dalam penelitian ini disebut sebagai *Reciprocity* dan Trust, merupakan landasan utama masyarakat pesisir di dalam melakukan aktivitas baik sebagai pelaku ekonomi maupun sebagai bagian dari makhluk sosial yang hidup bermasyarakat. Hal ini sesuai dengan makna penuturan responden informan Ismail (Ketua Kelompok Nelayan, 64 tahun) sebagai berikut:

*"Program PEMP menurut saya harus berfokus pada kesejahteraan masyarakatnya. Dengan sikap saling menghormati dan saling mempercayai, akan masyarakat tercipta masyarakat yang bertenggang rasa. Masyarakat yang seperti itu sangat mendukung keefektifan program pemberdayaan ekonomi dalam mencapai tujuannya yakni mensejahterakan masyarakat pesisir secara merata...."*

Sikap timbal balik dan saling percaya di antara para nelayan memang merupakan faktor utama yang mendorong masyarakat bisa bekerja dengan baik dan optimal sehingga bisa memperoleh hasil maksimal pula. Di dalam masyarakat Indragiri Hilir dan Bengkalis secara umum memiliki budaya kerja. Kelompok kerabat ini menjalankan fungsi-fungsi sosialnya secara korporasi yang diwujudkan dalam bidang ekonomi, misalnya bantu membantu dalam pengolahan tanah atau sumber daya alam

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

lainnya, sedangkan dalam bidang pendidikan dan kesehatan, misalnya ramai-ramai memberi sumbangan kepada anggota yang memerlukan bantuan pendidikan anaknya atau biaya perawatan di rumah sakit. Selanjutnya, dalah aturan-aturan yang telah disepakati bersama yang digunakan dalam berkomunikasi secara sosial antar anggota kelompok masyarakat, termasuk hubungannya dengan aktivitas ekonomi yang memiliki sanksi-sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan penuturan responden informan Ismail (Ketua Kelompok Nelayan, 64 tahun) sebagai berikut:

*"Misalkan ada anggota kelompok yang melanggar aturan dan norma masyarakat, maka anggota tersebut harus siap mendapat sanksi masyarakat seperti misalnya jika pelanggaran tersebut berat, anggota tersebut dikeluarkan dari kelompok dan tidak lagi dapat menerima bantuan dari kelompok....."*

Dari penuturan responden informan diatas, terungkap bahwa didalam kerja kelompok ada aturan-aturan (norma) yang disepakati dan harus ditaati. Pelanggar norma tersebut akan mendapatkan sangsi berupa hilangnya kepercayaan dan bahkan bisa dikeluarkan dari anggota kelompok walaupun nelayan tersebut merupakan bagian dari kelompok kerabat. Disini nampak bahwa walaupun kelompok kerja adalah bagian dari kelompok kekerabatan, namun di dalam melakukan fungsi-fungsi sosial seperti aktivitas ekonomi dari para nelayan tetap dituntut untuk profesional dalam arti mentaati aturan-aturan khusus yang telah ditetapkan bersama.

Segala aktivitas yang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok masyarakat tertentu tujuan materialnya adalah untuk memenuhi segala kebutuhan di dalam rangka mensejahterahkan diri, keluarga dan masyarakatnya sesuai dengan level sosial yang disandangnya. Masyarakat pesisir Indragiri Hilir dan Bengkalis dengan budaya atau kebiasaannya sebagai modal sosial yang menopang setiap aktivitas yang dilakukan. Sudah menjadi kelaziman atau sunatullah bahwa hasil yang akan dicapai

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

adalah sesuai dengan usahanya (proses kerja), sehingga jika masyarakat pesisir berhasil mensejahterahkan dirinya adalah tidak lepas dari usaha atau proses yang dilakukannya. Nampaknya modal sosial disatu sisi merupakan faktor yang berperan penting di dalam proses kerja atau usaha meningkatkan kesejahteraan, Sementara program pemberdayaan masyarakat di sisi lain adalah bagian yang penting sebagai faktor motivasi terhadap pembentukan dan pemeliharaan modal sosial itu sendiri.

Uraian diatas memberikan makna bahwa pemberdayaan masyarakat tidak lain adalah motivator langsung terhadap modal sosial, dan modal sosial merupakan penopang proses kerja didalam usaha mencapai kesejahteraan. Sehingga sangat jelas disini bahwa program pemberdayaan masyarakatakan bisa, berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika masyarakat tersebut memiliki modal sosial yang tinggi, sebagai mana modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat pesisir Indragiri Hilir dan Bengkalis tersebut di atas.

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/